

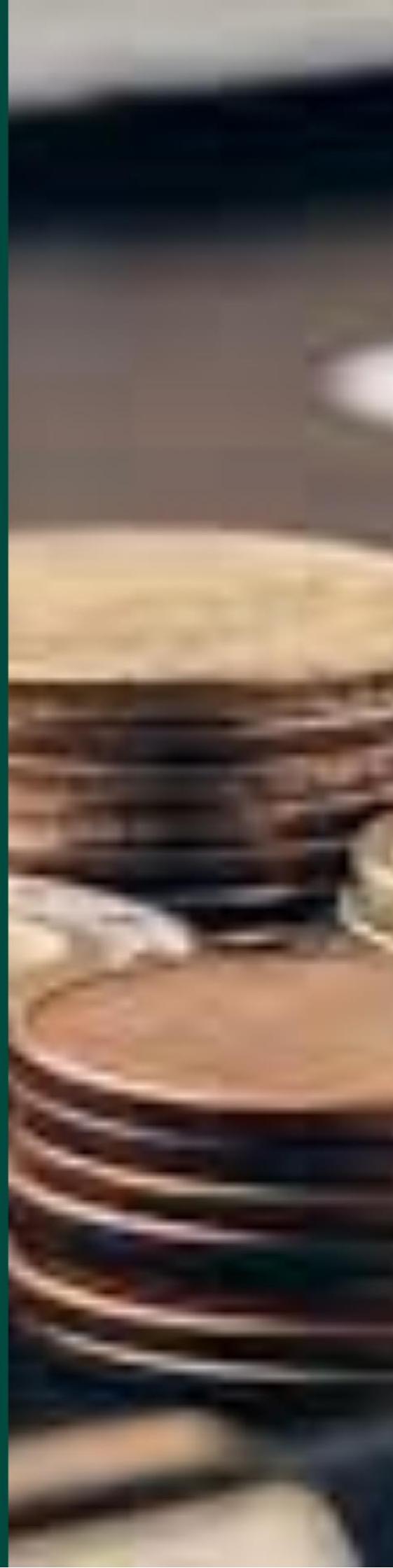


BUKU AJAR

Akuntansi Keuangan Publik

PENULIS

Sarwenda Biduri
Ruci Arizanda
Sigit Hermawan



Buku Ajar

Akuntansi Keuangan Publik

Oleh

Sarwenda Biduri
Ruci Arizanda Rahayu
Sigit Hermawan



Diterbitkan oleh
UMSIDA PRESS
Tahun 2021

Buku Ajar

Akuntansi Keuangan Publik

Penulis :

Sarwenda Biduri

Ruci Arizanda Rahayu

Sigit Hermawan

ISBN :

978-623-6292-35-8

Editor :

M.Tanzil Multazam,S.H., M.Kn

Mahardika Darmawan,K.W ., M.Pd

Copy Editor :

Wiwit Wahyu Wijayanti

Design Sampul dan Tata Letak :

Wiwit Wahyu Wijayanti

Penerbit :

UMSIDA Press

Redaksi :

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Jl. Mojopahit No 666B Sidoarjo, Jawa Timur

Cetakan pertama, September 2022

© Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dengan suatu apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Prakata

Satu diantara tujuan penyusunan buku ini adalah untuk memperkaya bacaan akuntansi keuangan publik. Buku ini mencoba menghubungkan pemahaman konsep akuntansi keuangan publik dengan dunia praktik utamanya di lingkungan pemerintah daerah. Buku ini membahas secara umum beberapa konsep yang berkembang di sektor publik. Kelebihan pada pembahasan buku ini memfokuskan terhadap aspek pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan serta pemeriksaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah. Dalam buku ini juga dibahas mengenai beberapa contoh pengelolaan barang daerah. Materi pembahasan buku ini terdiri atas 12 (dua belas) bab. Target pembaca buku ini adalah mahasiswa dan praktisi akuntansi sektor publik.

Daftar Isi

Prakata	ii
Daftar Isi	iii
Bab 1	6
Laporan keuangan, Siklus Akuntansi, dan Teknik Akuntansi Pemerintahan	6
1.1 Pengertian Laporan Keuangan	6
1.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan	6
1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	6
1.4 Siklus Akuntansi Pemerintah	7
1.5 Teknik Akuntansi Pemerintahan	8
Bab 2	12
Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan	12
2.1 Pengertian Kerangka Konseptual Pemerintahan	12
2.2 Fungsi Kerangka Konseptual Pemerintahan	12
2.3 Manfaat Kerangka Konseptual Pemerintahan	13
2.4 Isi Pembahasan Kerangka Konseptual Pemerintahan	13
Bab 3	14
Penyajian Laporan Keuangan	14
3.1 Pengertian Laporan Keuangan	14
3.2 Tujuan Laporan Keuangan	14
3.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan	14
3.4 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan	15
3.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan	15
Bab 4	16
Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional	16
4.1 Laporan Realisasi Anggaran	16
4.2 Akuntansi Pendapatan LRA	16
4.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	16
4.4 Laporan Operasional	17
4.5 Laporan Arus Kas	17
4.6 Laporan Perubahan Ekuitas	17
4.7 Catatan Atas Laporan Keuangan	17
4.8 Pengakuan Pendapatan	18
4.9 Pengakuan Beban dan Belanja	18
Bab 5	19

Laporan Arus Kas	19
5.1 Pengertian Arus Kas	19
5.2 Unsur-Unsur Arus Kas	19
5.3 Element Laporan ArusKas	19
5.4 Manfaat Arus Kas	20
5.5 Contoh Laporan Arus Kas PemerintahKab/Kota	20
5.6 StanDarid Pengukuran ArusKas	22
Bab 6	23
Akuntansi Kas dan Akuntansi Piutang	23
6.1 Definisi Kas dan Setara Kas	23
6.2 Klasifikasi Kas	23
6.3 Pengakuan Kas	24
6.4 Definisi Piutang	25
6.5 Klasifikasi Piutang	25
6.6 Pengakuan Piutang	25
6.7 Prosedur Akuntansi Kas dan Piutang	25
6.8 Journal Stan Dari	27
Bab 7	29
Akuntansi Persediaan	29
7.1 Pengertian Akuntansi Persediaan	29
7.2 Klasifikasi Persediaan	29
7.3 Sistem Akuntansi Persediaan	29
7.4 Pihak-Pihak yang Terkait Akuntansi Persediaan	29
7.5 Dokumen yang Digunakan	30
7.6 Jurnal Standar	30
7.7 Penyajian Persediaan	32
7.8 PengungkapanPersediaan	33
Bab 8	34
Akuntansi Investas dan Dana Bergulir	34
8.1 Pengertian Investasi	34
8.2 Klasifikasi Investasi di Pemerintahan	34
8.3 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Sistem Akuntansi pada Pemerintah	35
8.4 Dokumen yang Digunakan	36
8.5 Metode Penilaian Investasi	37
8.6 Jurnal Stan Dari Pemerintah Pusat	38
8.7 Jurnal StanDari Pemerintah Daerah	39
8.5 Pengertian Dana Bergulir	43

Bab 9	44
Akuntansi Aset Tetap-Bagian 1 (Perolehan dan Pemanfaatan)	44
9.1 Pengertian Aset Tetap	44
9.2 Pengakuan Aset Tetap	44
9.3 Pengakuan Aset Tetap	45
9.4 Pengukuran Aset Tetap	45
9.5 Jurnal Standar	47
Bab 10	49
Akuntansi Aset Tetap-Bagian 2 (Penghentian)	49
10.1 Pengeluaran Setelah Perolehan	49
10.2 Pelepasan Aset Tetap	49
10.3 Jurnal StanDari	50
Bab 11	53
Akuntansi Hutang dan Pinjaman Daerah	53
11.1 Definisi Utang	53
11.2 Klasifikasi Utang	53
11.3 Apa ada Hidup Sesudah Mati?	53
11.4 Pengertian Pinjaman Daerah	54
11.5 Jenis Pinjaman Daerah	54
11.6 11.6 Sumber Pinjaman Daerah	55
11.7 Kegunaan & Pembayaran Kembali Pinjaman	55
Bab 12	57
Konsolidasi Laporan Keuangan	57
12.1 Pengertian Laporan Keuangan Konsolidasi	57

Bab 1

Laporan keuangan, Siklus Akuntansi, dan Teknik Akuntansi Pemerintahan

1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Secara umum, laporan keuangan adalah dokumen yang berisikan catatan dan akhirnya adalah laporan yang berisikan berbagai transaksi yang melibatkan mata uang, termasuk pembelian dan penjualan, dan transaksi kredit. Biasanya laporan selesai dalam jangka waktu tertentu. Keputusan tersebut ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dilakukan setiap bulan atau setahun sekali. Terkadang perusahaan menggunakan keduanya secara bersamaan.

Laporan keuangan hanya digunakan untuk mengetahui status keuangan perusahaan. Sehingga atasan dapat menilai dengan baik apakah ada masalah dengan situasi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, laporan ini harus disusun secara akurat dan hati-hati. Karena bentuk laporannya, tentu menjadi tanggung jawab mutlak untuk menyampaikannya kepada operator keuangan. Praktis keuangan harus melaporkan laporannya secara ringkas di depan atasannya. Biasanya hal ini dilakukan pada saat evaluasi.

Dari pengertian di atas dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa pengertian laporan keuangan merupakan suatu dokumen yang berisikan catatan atau data transaksi perusahaan dalam periode tertentu, yang mana dokumen tersebut wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan dalam mengevaluasi untuk kemajuan perusahaan pada masa yang akan datang.

1.2 Jenis-Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan yang diketahui hanyalah 5 jenis yakni Laporan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal, Laporan Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Saat ini, tidak banyak perbedaan antara apa yang harus dilakukan pemerintah daerah dan laporan keuangan sektor swasta umum. Adapun jenis laporan keuangan yang harus dibuat menjadi:

- a. Neraca
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- c. Laporan Arus Kas (LAK)
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

1.3 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berikut ini merupakan komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1.3.1 Elemen Neraca

Elemen yang terdapat di Neraca pada Pemerintah daerah yakni aset, kewajiban dan Ekuitas dana.

- a. Aset. Aset dikelompokkan menjadi empat macam yakni Aset Lancar, investasi Jangka Panjang, aset tetap, dan dana Cadangan
- b. Kewajiban. Kewajiban dikelompokkan menjadi dua macam yakni Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

- c. Ekuitas Dana. Ekuitas Dana dikelompokkan menjadi tiga macam yakni Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana investasi, Ekuitas Dana Cadangan.

1.3.2 Elemen Laporan Realisas Anggaran

Elemen atau unsur yang ada dalam Laporan Realisas Anggaran terdiri dari, yaitu:

- a. Pendapatan dikelompokkan menjadi tiga unsur, yakni Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah
- b. Belanja dikelompokkan menjadi tiga unsur, yakni Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja Tak Terduga.
- c. Transfer
- d. Surplus/Defisit
- e. Pembelanjaan dikelompokkan menjadi dua macam, yakni Penerimaan Pembelanjaan dan Pengeluaran Pembiayaan
- f. SLPA/SKPA Sisa Lebih / Kurang Pembelanjaan Anggaran (SLPA/SiKPA) adalah selisih Lebih / Kurang antara Realisas Penerimaan dan Pengeluaran daerah selama periode anggaran. SLPA/SKPA dapat dihitung Dari nilai pada pos Surplus/Defisit ditambah dengan pos Pembelanjaan Neto.

1.3.3 Elemen Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas

Elemen Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas dibagi dalam empat aktivitas utama, yaitu: Arus Kas Dari Aktivitas Operasi, Arus Kas Dari Aktivitas investasi, Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan, Arus Kas Dari Aktivitas Nonanggaran.

1.3.4 Elemen Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan

Elemen Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bentuk Dari pengungkapan (disclosure) oleh pemerintah daerah. Seberapa luas pengungkapan informasi tersebut sangat tergantung pada kemauan politik (political will) pemerintah daerah.

1.4 Siklus Akuntansi Pemerintah

Laporan keuangan yang akurat dihasilkan berdasarkan kejadian dan aktivitas bisnis apabila melakukan pencatatan dengan baik. Kejadian-kejadian tertentu, yang dikenal dengan istilah transaksi, melibatkan pemindahan atau pertukaran barang atau kejadian antara dua entitas atau lebih. Setidaknya terdapat empat tahap dalam siklus akuntansi pemerintah, tahapan tersebut yakni :

- a. Pencatatan
- b. Penggolongan
- c. Peringkasan
- d. Penginterpretasian (hasil pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi).

Keempat tahapan dalam siklus akuntansi tersebut tidak berbeda dengan siklus akuntansi pada perusahaan bisnis. Yaitu mula Dari tahap pencatatan, pengelompokkan dan merangkum semua transaksi atau peristiwa keuangan, khususnya dalam melakukan menyusun Anggaran laporan Realisas anggaran.

Jenis Transaks Keuangan

Transaks atau peristiwa keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD, pada dasarnya terdiri Dari :

- a. Transaks Penerimaan Kas, Yaitu semua Pendapatan daerah dalam Jangka waktu tertentu.
- b. Transaks Pengeluaran Kas, Yaitu semua Pengeluaran Kas Dari dalam jangka waktu tertentu
- c. Transaks Selain Kas, adalah semua aktivitas keuangan Selain Dari Pendapatan dan Pengeluaran Kas Daerah dalam Jangka waktu tertentu. Contoh transaks koreksi kesalahan atas pencatatan sebelumnya atau pemberian atau Penerimaan donas dalam bentuk barang.

Media Akuntansi

Transaksi keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang terdiri Dari: Penerimaan kas, Pengeluaran kas, dan Selain Kas dalam proses akuntansi dicatat, digolongkan, dan diringkas ke dalam Catatan Akuntansi berdasarkan Dokumen atau Bukti Transaksi yang sah. (Gie 2020) Dokumen transaksi merupakan berkas tertulis yang dijadikan sebagai Bukti telah terjadinya suatu aktivitas keuangan, sedangkan Catatan Akuntansi, terdiri Dari: Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Pembantu. Berdasarkan uraian tersebut, alat yang digunakan dalam penerapan proses akuntansi Yaitu: Dokumen atau Bukti Transaksi, Buku Jurnal, Buku Besar dan Buku Pembantu.

Dokumen Transaksi

Dokumen atau Bukti Transaksi adalah formulir-formulir yang diperlukan sebagai tanda Bukti telah terjadinya suatu aktivitas keuangan yang dijadikan sebagai dasar pencatatan dalam akuntansi.

1.5 Teknik Akuntansi Pemerintahan

1.5.1 Persamaan Akuntansi Pemerintahan

Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antara aset, kewajiban dan Ekuitas dana dalam akuntansi. Tanggung jawab pemerintah atas keuangan rakyat yang dikelolanya diwujudkan dalam bentuk laporan neraca, yang mensyaratkan bahwa Aset pemerintah harus menunjukkan sumbernya, apakah berasal Dari kewajiban ataukah milik pemerintah itu sendiri (equity fund).

Persamaannya :

$$\text{Aset (A)} = \text{Kewajiban (K)} + \text{Ekuitas Dana (ED)}$$

Persamaan Akuntansi Bisnis :

$$\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Owner's Equity}$$

Owner's Equity = menunjukkan kepemilikan pada perusahaan oleh pemegang sahamnya

$$\text{Assets} = \text{Liabilities} + \text{Fund Balance}$$

Persamaan Akuntansi Pemerintahan

Fund Balance (Saldo Dana) = Nets Assets (Aset Bersih), Saldo dana tidak menunjukkan kepemilikan siapapun

Dalam sistem akuntansi pemerintahan yang berlaku di Indonesia berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka Equity Fund pemerintah dibagi menjadi 3 kelompok Yaitu :

- Ekuitas Dana Lancar (EDL)
- Ekuitas Dana investas (EDI)
- Ekuitas Dana Cadangan (EDC)

Berikut ini penjelasan Equity Fund pemerintah:

1) Ekuitas Dana Lancar

Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara Aset Lancar dengan kewajiban Jangka pendek. Dengan kata lain Ekuitas Dana Lancar sama dengan Aset Lancar dikurangi kewajiban Jangka pendek.

Tabel 1. 1: Tabel Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Lancar

Akun Sub Ekuitas Dana Lancar	Akun Lawan
SLPA/SiKPA (Selisih Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran)	Kas dan Kas Daerah, Kas dan Bendahara Pengeluaran, dan investas Jangka Pendek
Pendapatan yang Ditangguhkan	Kas dan Bendahara Penerimaan
Cadangan Piutang	Piutang
Cadangan Persediaan	Persediaan

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek	Hutang Jangka Pendek
--	----------------------

Persamaan Akuntansi EDL :

$$EDL = \text{Aset Lancar} - \text{Kewajiban Jangka Pendek}$$

2) Ekuitas Dana investas (EDI)

Ekuitas Dana investas mencerminkan Aset pemerintah yang tertanam dalam Aset tidak Lancar (tidak termasuk dana cadangan), dikurang dengan kewajiban Jangka panjang. Ekuitas Dana investas mencerminkan nilai bersih kekayaan pemerintah daerah yang tertanam dalam kekayaan berjangka panjang.

Penyajian Ekuitas Dana investas d neraca dapat diperoleh dengan menjumlahkan :

- Investasi Jangka Panjang
- Aset Tetap
- Aset Lainnya

Dikurang :

- Jumlah Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka panjang.

Tabel 1.2: Tabel Pasangan Akun dalam Ekuitas Dananvestasi

Akun SubEkuitas Dana nvestasi	Akun Lawan
Dinvestasikan dalam investas Jangka Panjang	Investasi Jangka Panjang
Dinvestasikan dalam Aset Tetap	Aset Tetap
Dinvestasikan dalam Aset Lainnya	Aset Lainnya
Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Panjang	Hutang Jangka Panjang

Persamaan Akuntansi EDI

$$ED = \text{investas Jangka Panjang} + \text{Aset Tetap} + \text{Aset Lainnya} - \text{Kewajiban Jangka Panjang}$$

3) Ekuitas Dana Cadangan (EDC)

Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan Aset pemerintah yang dicadangka untuk mencapai Tujuan yang telah direncanakan sebelumnya sesuai Peraturanperundang-undangan. Dengan kata lain Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan nilai bersih pemerintah daerah yang tertanam pada Dana Cadangan. Dengan demikian jumlah yang disajikan d neraca adalah seBesar jumlah Dana Cadangan. Dana Cadanganni tercantum d dalam rekening bank yang diatur dengan Peraturandaerah.

Tabel 1.3: Tabel Pasangan Akun dalam Ekuitas Dana Cadangan

Akun Sub Ekuitas Dana Cadangan	Akun Lawan
Dinvestasikan dalam Dana Cadangan	Dana Cadangan

Apabila faktor-faktor penyebab Perubahan Ekuitas dipisahkan, maka saat periode fiskal maka akan terjadi transaksi, Ekuitas awal tidak terjadi perubahan, dan timbul adanya faktor Pendapatan (P), Belanja Operasi (BO), Belanja Modal (BM), Pendapatan Pembelanjaan (PP), dan Belanja Pembelanjaan (BP) dalam Persamaan d atas. Pada akhir periode, Persamaan akuntansi pemerintah akan menjadi sebagai berikut :

$$A = K + (EDL + P - BO) + (ED + BM) + EDC + PP - BP$$

Basis AKUNTANSI

Basis akuntansi menjadi pijakan penting dalam melakukan pencatatan. (Admin Ham 2014)

- a. Menentukan taksiran yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan dan pelaporan.
- b. Akan berpengaruh pada struktur akuntansi yang dibagiun, baik kerangka Konseptual maupun pernyataan-pernyataannya
- c. Saat transaksi tersebut diakui dan seberapa banyak nilai yang diakui
- d. Pelaporan keuangan dapat menjadi sebuah proses yang dapat berpengaruh oleh pemilihan Basis akuntansi terutama
 - 1) Bentuk-bentuk laporan yang digunakan dan
 - 2) Informasi atau unsur yang harus dilaporkan.

Basis akuntansi ditentukan berdasarkan kapan terjadinya suatu transaksi dan aktivitas yang terjadi diakui, MIS : Basis akrual, Basis kas

Fokus pengukuran menentukan apa yang akan dilaporkan, dengan kata lain Jenis Aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan dalam neraca. Keduanya saling berhubungan.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah :

Basis Kas untuk pengakuan

- a. Pendapatan
- b. Belanja
- c. Pembelanjaan dalam Laporan Realisas Anggaran

Basis akrual untuk pengakuan

- a. Aset
- b. Kewajiban
- c. Ekuitas dalam neraca.

Praktek akuntansi pemerintah d Indonesia(LRA) :

- 1) Pendapatan diakui pada saat adanya Penerimaan pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
- 2) Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.
- 3) Dana Cadangan diakui pada saat pembentukan Yaitu pada saat dilakukan penyisihan uang untuk Tujuan penCadangan yang dimaksud.
- 4) Penerimaan Pembelanjaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah.
- 5) Pengeluaran Pembelanjaan diakui pada saat dikeluarkan Dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

1.5.2 Akuntansi Anggaran

- a. Akuntansi Anggaran mengacu pada pelaksanaan yang banyak dilakukan oleh organisasi sektor publik, khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun-akun operasinya menggunakan format yang sama dengan anggarannya.
- b. Tujuannya menekankan pada peranan Anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan pertanggungjawaban atau akuntabilitas.
- c. Menyajikan akun-akun operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan anggarannya
➔ kemudahan
- d. Menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah yang aktual dan dicatat secara berpasangan (double entry) atas :
 - 1) Pendapatan
 - 2) Apropriasi belanja

1.5.3 Akuntansi Komitmen

- a. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran. Agar manajer dapat mengendalikan anggarannya perlu mengetahui berapa Besar Anggaran yang telah dilaksanakan atau digunakan berdasarkan order yang telah dikeluarkan
- b. Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut in berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat awal yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima merupakan sub sistem dari sistem akuntansi utama organisasi.
- c. Bisa digunakan dengan sistem akuntansi Basis akrual maupun Basis kas
- d. Organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran.

Bab 2

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan

2.1 Pengertian Kerangka Konseptual Pemerintahan

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya dalam artikel ini disebut Kerangka Konseptual) merupakan suatu konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun laporan keuangan, pemeriksaan, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Kerangka Konseptual terdapat dalam bentuk SAP baik dan SAP Berbasis Akrua (lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010) serta SAP Berbasis Kas menuju akrua yang terdapat (lampiran Peraturan pemerintahan nomor 71 tahun 2010). (Peraturan Pemerintah 2010)

Kerangka Konseptual menjelaskan konsep-konsep yang menjadi dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah dalam menjalankan tugasnya;
- b. Penyusun laporan keuangan dalam menangani masalah akuntansi yang tidak ditentukan dalam standar;
- c. Auditor menyatakan pendapat apakah laporan keuangan disusun berdasarkan Standar akuntansi pemerintah; dan
- d. Pemakai laporan keuangan menginterpretasikan informasi dalam laporan keuangan yang disusun berdasarkan Standar akuntansi pemerintah.

2.2 Fungsi Kerangka Konseptual Pemerintahan

Kerangka Konseptual terdapat fungsi sebagai referensi yang memiliki permasalahan akuntansi yang belum dinyatakan dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. (Deev 2017)

Kerangka Konseptual berlaku untuk laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Kerangka Konseptual membahas:

- a. Tujuan Dari kerangka konseptual;
- b. lingkungan akuntansi pemerintah;
- c. pengguna dan kebutuhan informasi terhadap pengguna;
- d. entitas pelapor;
- e. peran dan Tujuan laporan keuangan,
- f. dan dasar hukum;
- g. menentukan asumsi dasar, ciri kualitatif sebagai penentu manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
- h. definisi, pengakuan, serta pengukuran unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan. (Peraturan Pemerintah 2010)

Kerangka dasar membahas laporan keuangan umum (general purpose financial statements, yang selanjutnya disebut sebagai "laporan keuangan", termasuk laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan memakan waktu Kurang Dari satu tahun dalam memenuhi kebutuhan sejumlah Besar pengguna

sekaligus. Beberapa Dari pengguna tersebut membutuhkan dan berhak untuk memperoleh informasi Selain informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Namun, banyak pengguna yang sangat menggantungkan laporan keuangan sebagai sumber utama informasi keuangan, sehingga kebutuhan mereka harus dipertimbangkan saat menyusun dan menyampaikan laporan. Laporan keuangan dengan Tujuan khusus, serupa dengan prospektus dan Perhitungan pajak yang bukan termasuk dalam laporan keuangan. Kerangka dasar untuk berbagai macam Jenis perusahaan komersial, baik sektor publik maupun sektor swasta. Perusahaan pelapor adalah industri yang laporan keuangannya digunakan oleh pemakai yang menggantungkan laporan keuangan tersebut sebagai sumber utama informasi keuangan perusahaan. (Dewi Sarifah Tullah, Apriyanti, and Suryat 2019)

2.3 Manfaat Kerangka Konseptual Pemerintahan

Kerangka Konseptual terdapat manfaat Besar bagi penggunanya. Salah satu manfaat kerangka Konseptual adalah untuk membentuk kerangka Konseptual dan menghubungkannya dengan tujuannya, menyediakan kerangka kerja untuk memecahkan masalah praktis baru (masalah yang belum dibakukan), dan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan konsep pengguna laporan keuangan mengenai laporan keuangan, Meningkatkan komparabilitas laporan keuangan antar perusahaan. (Harris, n.d.).

2.4 Isi Pembahasan Kerangka Konseptual Pemerintahan

Kerangka Konseptual terdapat pembahasan mengenai :

- a. Tujuan Dari kerangka konseptual
- b. Lingkungan pada akuntansi pemerintahan
- c. Pengguna dan kebutuhan informasi pada pengguna
- d. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan
- e. Peran dan Tujuan pelaporan keuangan, Komponen laporan keuangan, dan dasar hukum
- f. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan kegunaan informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi
- g. Berbagai unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya. Kerangka Konseptual berlaku untuk pelaporan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Bab 3

Penyajian Laporan Keuangan

3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah suatu informasi yang berkaitan tentang anggaran yang disusun dan disajikan dalam jangka waktu satu tahun sekali dalam pemenuhan kebutuhan beberapa besar pengguna. Laporan keuangan dipakai sebagai pokok utama dalam menggali informasi keuangan dan maka dari itu laporan keuangan tersebut diharuskan untuk disusun dan disajikan dengan melihat kebutuhan yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan.

Laporan keuangan memiliki arti sebagai keluaran dari sistem akuntansi yang memiliki manfaat dalam memberikan suatu informasi kepada pihak yang menjadikan laporan keuangan tersebut menjadi tolak ukur utama dalam mengambil sebuah keputusan (Mahmudi 2011)

Prosedur dari pelaporan keuangan, dimana laporan yang integral biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi mengenai penjabaran dimana bagian integral dari laporan keuangan. Perusahaan pelapor adalah industri yang laporan keuangannya dipakai bagi pengguna dimana pengguna tersebut mengandalkan laporan keuangan tersebut sebagai tolak ukur atau pokok utama dalam menggali informasi keuangan perusahaan.

3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan keuangan memiliki tujuan yaitu memberikan laporan yang berkaitan dengan posisi keuangan, kinerja, dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang mana hal tersebut memiliki keuntungan bagi pemakai laporan dapat mengambil suatu keputusan di masa yang mendatang. Laporan keuangan dapat menunjukkan tanggung jawab divisi pengelola sumber daya yang dipercayakan kepada mereka sehingga dapat membuat keputusan ekonomi. Pengguna dan kebutuhan informasi laporan keuangan digunakan oleh pemakai yang berbeda yang disebut sebagai pemangku kepentingan (stakeholder), termasuk investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok dan kreditor usaha, pelanggan, pemerintah serta lembaga - lembaga lainnya, dan masyarakat.

3.3 Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan Anggaran dan laporan keuangan dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran dan laporan finansial. (Binus University 2015)

Pengukuhan dalam akuntansi merupakan proses ditetapkan terpenuhinya terpenuhinya standar mencatat suatu peristiwa dalam catatan akuntansi untuk menjadikannya sebagai pelengkap unsur aset, liabilitas, modal, Pendapatan LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan, dan beban, yang akan dimasukkan dalam entitas yang relevan dalam laporan keuangan yang dilaporkan. Pengakuan diaktualkan dalam catatan dengan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang berpengaruh terhadap peristiwa yang memiliki keterkaitan. Standar minimum yang harus dipenuhi oleh keadaan atau peristiwa agar diakui yaitu:

- Manfaat ekonom memiliki keterkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan menitik keluar dari atau masuk kedalam entitas pelaporan yang berkaitan.
- Kejadian atau peristiwa tersebut memiliki nilai atau biaya yang mampu ditaksir atau diproyeksikan dengan andal.

- c. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

3.4 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah moneter untuk mengaku dan memasukkan setiap item dalam laporan keuangan. Memanfaatkan biaya historis untuk mengukur setiap pos- pos dalam laporan keuangan. Aset ditulis sejumlah nilai wajar Dari pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau tabalan untuk perolehan aset. Liabilitas ditulis se Besar nilaii wajar sumber daya ekonomi yang dipaka oleh sektor publik dalam pemenuhan kewajiban yang terkait, dan pos-pos laporan keuanga diukur dalam mata uang rupiah Indonesia. Aktivitas yang memaka valuta asing dilakukan transfigurasi menjadi bentuk mata uang rupiah. (Dewi Sarifah Tullah et al. 2019)

3.5 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan merupakan bentuk preskriptif yang perlu dipertimbangkan dalam pencapaian tujuan formasi keuangan. Empat karakteristik adalah permis normatif bagi laporan keuangan sektor publik yang diharapkan:

a. Relevan

informasi keuangan tersebut apabila dapat memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemaka dan dapat mengevaluasi kejadian masa lalu atau sekarang maka akan dikatakan informasi keuangan tersebut relevan, memproyeksikan masa depan, dan mengkonfirmasi hasil evaluasi masa lalu. Hal tersebut bahwa informasi keuangan dapat dikatakan relevan.

b. Andal

informasi keuangan tidak mengandung arti yang menyimpang dan kesalahan besar, serta secara jujur mencerminkan kebenaran dan dapat dibuktikan informasi yang didapat bisa saja relevan, apabila disajikan dengan sifat tidak andal tersebut, maka penggunaannya dapat menyesatkan.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi keuangan dapat dibandingkan dengan informasi keuangan tahun yang lalu atau dapat dibandingkan dengan informasi keuangan industri lainnya. Maka dari itu, informasi keuangan akan lebih bermanfaat jika dapat dibandingkan.

d. Dapat Dipahami

informasi keuangan yang diberikan dan diutarakan dapat dengan mudah dimengerti oleh pemaka dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemaka. Maka dari itu, pemaka harus memahami sepenuhnya aktivitas dan lingkungan bisnis Dari bagian utama laporan, serta kemauan pemaka untuk memahami informasi yang relevan.

Bab 4

Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional

4.1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan diagram sumber, penugasan, dan penggunaan Aset terkait uang yang diawas oleh pemerintah pusat daerah, yang menguraikan perbandingan antara Anggaran dan realisasinya dalam satu periode pengumuman.

Pada akhir tahun anggaran, terwujudnya dan tercapainya pelaksanaan keuangan daerah Anggaran akan dilaporkan sesuai dengan prinsip ekonomi, efisien dan efektif dalam Laporan Realisasi Anggaran (Laporan Realisasi Anggaran / LRA).

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) di Pusat dan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan, menurut Government Peraturan Nomor 71 Tahun 2010, tercatat menggunakan Anggaran Berbasis Kas atau mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lain saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar. Saat dibayar, anggarannya akan dicatat sebagai pembelian atau Pengeluaran sesuai dengan akun Standar Dari grafik yang telah ditentukan sebagai pengurangan Dari Anggaran dalam Anggaran Laporan Realisasi (LRA). Sebaliknya, jika ada Anggaran Pendapatan yang masuk, itu akan dicatat sebagai kenaikan Anggaran dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

4.2 Akuntansi Pendapatan LRA

Unsur-unsur yang mencakup dalam LRA terdiri atas pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Setiap unsur-unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA adalah Penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh badan pemerintah lainnya yang termasuk Lebih dalam penyesuaian Anggaran dalam periode tahun Anggaran penting yang merupakan hak pemerintah, dan tidak harus dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja adalah semua Pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun Anggaran bersangkutan yang tidak dapat diganti oleh pemerintah.
- c. Transfer adalah Penerimaan atau Pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan Dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembelanjaan (financing) adalah setiap penerimaan/Pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun - tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan Pembelanjaan antara lain dapat berasal Dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran Pembelanjaan antara lain digunakan untuk Pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan Modal oleh pemerintah:

4.3 Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

NERACA

Neraca menggambarkan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang, dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri Dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing - masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat Dari peristiwa masa lalu dan Dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan kejadian bagi masyarakat umum dan sumber - sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- b. Kewajiban adalah utang yang timbul Dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- c. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara Aset dan kewajiban pemerintah.

4.4 Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah Ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri Dari pendapatan- LO, beban, Transfer dan pos - pos luar biasa. Masing - masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- b. Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- c. Transfer adalah hak Penerimaan atau kewajiban Pengeluaran uang Dari/oleh suatu entitas pelaporan Dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos Luar Biasa adalah Pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

4.5 Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir Kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Kas adalah semua aliran Kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran Kas adalah semua aliran Kas yang keluar Dari Bendahara Umum Negara/Daerah

4.6 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4.7 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian Dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan LAK. CaLK juga berisi mengenai kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diwajibkan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang dibutuhkan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. (Peraturan Pemerintah 2010)

Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/ menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengungkappnformas umum Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansii;
- b. Menyediakannformasi kebijakan fiskal/keuangan dan makroekonomi
- c. MeringKas pencapaian Tujuan keuangan tahunan Dari laporan kendala dan hambatan yang dihadapi dalam mencapa tujuan;
- d. Menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansii yang dipilih untuk transaks dan hal-hal penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Pengungkappnformas yang tidak tercantum pada bagian depan laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh StanDari Akuntansi Pemerintahan (PSAP);
- g. Memberikan informasi lain yang diperlukan untuk penyajian wajar yang tidak disajikan di bagian depan laporan keuangan.

4.8 Pengakuan Pendapatan

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatantersebut atau adan aliran masuk sumber daya ekonomi.Pendapatan-LRA diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.

4.9 Pengakuan Beban dan Belanja

Bebas diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Belanja diakui berdasarkan terjadinya Pengeluaran Dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau entitas pelaporan.Khusus pengeluaran melalu bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas Pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (diterbitkannya SP2D-GU).

Bab 5

Laporan Arus Kas

5.1 Pengertian Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan salah satu laporan keuangan pemerintah daerah yang sangat bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan untuk memahami Arus Kas yang dihasilkan oleh kegiatan pemerintah daerah. Kegiatan pemerintah daerah meliputi kegiatan usaha, kegiatan Investasi Aset non keuangan, kegiatan penggalangan dana dan kegiatan non Anggaran yang berkaitan dengan status keuangan pemerintah daerah. Melalui informasi dalam laporan Arus kas, pengguna laporan atau pembaca laporan keuangan dapat menguji kinerja keuangan pemerintah daerah sekarang dan memaknainya sebagai prediksi kondisi keuangan dimasa mendatang. Laporan Arus Kas merupakan penghubung dalam rantai akun riil yang tercermin dalam laporan neraca, dan akun nominal dalam laporan Realisas Anggaran (LRA).

Laporan Arus Kasni menjelaskan Perubahan Kas yang berkaitan dengan tambahan sumber Kas dan penggunaannya. Meskipun neraca hanya merupakan potret atau gambaran Dari aset, kewajiban, dan Ekuitas dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada tanggal pelaporan, LRA menunjukkan tingkat kepatuhan anggaran, tetapi tidak secara khusus meng informasiikan kegiatan pemerintah daerah. Oleh karenaitu, untuk menyempurnakannformasi neraca dan laporan Realisas anggaran, sehingga pengguna laporan keuangan dapat Lebih memahami dan mengevaluas kinerja keuangan pemerintah daerah, diperlukan laporan Arus Kas (Pandowo and Khudori 2017). Laporan Arus Kas menyajikannformas Kas yang berhubungan dengan kegiatan operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir Kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

5.2 Unsur-Unsur Arus Kas

Unsur yang mencakup dalam Arus Kas terdiri atas Penerimaan dan Pengeluaran kas, yang masing - masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penerimaan Kas adalah semua aliran Kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/daerah
- b. Pengeluaran Kas adalah semua aliran Kas yang keluar DariiBendahara Umum Negara/Daerah.

Jenis-Jenis laporan keuangan Jenis laporan keuangan pemerintah daerah yang harus dibuat oleh pemerintah daerah tidak jauh berbeda dengan laporan keuangan d sektor swasta. Jenis- Jenis laporan keuangan yang harus dilakukan meliputi:

- a. Neraca
- b. Laporan Realisas Anggaran(LRA)
- c. Laporan Arus Kas (LAK)
- d. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

5.3 Element Laporan ArusKas

Elemen Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas dibagi dalam empat aktivitas utama, yaitu:

- a. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi,
- b. Arus Kas Dari Aktivitasnvestasi,
- c. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan,
- d. Arus Kas Dari Aktivitas Non anggaran

Arus masuk dan Arus keluar dilaporkan untuk setiap aktivitas untuk memperoleh penjelasan mengenai Arus Kas bersih Dari setiap aktivitas. Kemudian jumlahkan Arus Kas bersih Dari Keempat aktivitas tersebut secara bersama-sama untuk mengetahui kenaikan atau penurunan Kas bersih selama periode akuntansi. Saldo Kas

akhir yang dilaporkan dalam laporan Arus Kas adalah jumlah saldo Kas awal yang diperoleh Dari data neraca awal ditambah dengan penambahan atau pengurangan Kas selama periode akuntansi.Saldo Kas akhir dalam laporan Arus Kas akan sama dengan saldo Kas yang dilaporkan pada neraca akhir. (Mardiasmo 2009)

5.4 Manfaat Arus Kas

Laporan Arus Kas dapat bermanfaat bagi pemaka laporan keuangan pemerintah daerah untuk mengevaluas dan memperoleh Perubahan Kas Dari saldo awal ke saldo akhir selama periode pelaporan.Laporan tersebut menghubungkan akun riil dan akun nominal d neraca.Berbeda dengan sektor komersial, Tujuan sektor publik (pemerintah) bukan untuk mengejar keuntungan, tetapi untuk memberikan pelayanan publik (public services).Yang mengukur kinerja pemerintah daerah bukanlah profitabilitasnya, melainkan kualitas pelayanan publik yang diberikan dan kualitas kualitas pelayanan publik yang diberikan.Sumber dan penggunaan dana publikin dijelaskan dalam LRA. Laporan Arus Kas akan memberikan manfaat sebagai berikut:

- Mencar tahu alasan surplus atau defisit anggaran.
- Memperkirakan kemampuan fiskal pemerintah daerah d masa depan.
- Memperkirakan kesinambungan fiskal pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik.

5.5 Contoh Laporan Arus Kas PemerintahKab/Kota

Laporan Arus Kas Pemerintah

KABUPATEN/KOTA

Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20X1 dan 20X0

No.	URAIAN	20X1	20X0
1	Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
2	Arus Masuk Kas		
3	Pendapatan pajak regional	XXX	XXX
4	Pendapatan retribusi regional	XXX	XXX
5	Pendapatan investasi	XXX	XXX
6	Lain-lain pendapatan asli regional	XXX	XXX
7	Dana alokasi umum	XXX	XXX
8	Taxwork	XXX	XXX
9	Dana bagi hasil bukan pajak	XXX	XXX
10	Dana alokasi khusus	XXX	XXX
11	Pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi	XXX	XXX
12	Pendapatan bagi hasil lainnya dari provinsi	XXX	XXX
13	Pendapatan hibah	XXX	XXX
14	Pendapatan dana darurat	XXX	XXX
15	Pendapatan lain	XXX	XXX
16	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 15)	XXX	XXX
17	Arus Keluar Kas		
18	Belanja pegawai	XXX	XXX
19	Belanja barang dan jasa	XXX	XXX
20	Bunga	XXX	XXX
21	Subsidi	XXX	XXX
22	Bantuan social	XXX	XXX
23	Hibah	XXX	XXX
24	Bagi hasil pajak ke desa	XXX	XXX
25	Bagi hasil retribusi ke desa	XXX	XXX
26	Bagi hasil pendapatan lainnya ke desa	XXX	XXX
27	Belanja tak tersangka	XXX	XXX

42	Belanja gedung dan bangunan	XXX	XXX
43	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	XXX	XXX
44	Belanja asset tetap lainnya	XXX	XXX
45	Belanja asset lainnya	XXX	XXX
46	Jumlah arus keluar kas (40-45)	XXX	XXX
47	Arus Kas Bersih dari Akt Inv Nonkeuangan (38-46)	XXX	XXX
48		XXX	XXX
49	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan	XXX	XXX
50	Arus Masuk Kas	XXX	XXX
51	Penerimaan penjualan asset yang dipisahkan	XXX	XXX
52	Penerimaan penjualan investasi lainnya	XXX	XXX
53	Penerimaan pinjaman luar negeri	XXX	XXX
54	Penerimaan pinjaman dari pemerintah pusat	XXX	XXX
55	Penerimaan pinjaman dari pemerintah daerah lain	XXX	XXX
56	Penerimaan pinjaman dari perusahaan Negara/daerah	XXX	XXX
57	Penerimaan pinjaman dari Bank/lembaga keuangan	XXX	XXX
58	Penerimaan pinjaman dalam negeri lainnya	XXX	XXX
59	Pencairan dana cadangan	XXX	XXX
60	Jumlah Arus Masuk Kas (51 s/d 29)	XXX	XXX
61	Arus Keluar Kas		
62	Pembayaran pokok pinjaman luar negeri	XXX	XXX
63	Pembayaran pokok pinjaman kepada pemerintah pusat	XXX	XXX
64	Pembayaran pokok pinjaman pemerintah daerah lain	XXX	XXX
65	Pembayaran pokok pinjaman perusahaan Negara/daerah	XXX	XXX
66	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri lainnya	XXX	XXX
67	Penyertaan modal pemerintah daerah	XXX	XXX
68	Pembayaran pokok pinjaman jangka panjang	XXX	XXX
69	Pembentukan dana cadangan	XXX	XXX
70	Jumlah Arus Keluar Kas (62 s/d 69)	XXX	XXX
71	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (60-70)	XXX	XXX
72			
73	Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran		
74	Arus Masuk Kas		
75	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
76	Jumlah Arus Masuk Kas (75)	XXX	XXX
77	Arus Keluar Kas		
78	Pengeluaran perhitungan fihak ketiga (PFK)	XXX	XXX
79	Jumlah arus keluar kas (78)	XXX	XXX
80	Arus kas bersih dari aktivitas nonanggaran (76-79)	XXX	XXX
81	Kenakan/penurunan kas (29+47+71+80)	XXX	XXX
82	Saldo awal kas di BUD	XXX	XXX
83	Saldo Akhir kas di BUD	XXX	XXX
84	Saldo kas di bendahara pengeluaran	XXX	XXX
85	Saldo kas di bendahara penerimaan	XXX	XXX
86	Saldo akhir kas (83+84+85)	XXX	XXX

Figure 5.1: Contoh Format Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten/Kota (Mardiasmo 2009)

Laporan Arus Kas memiliki kepentingan bagi manajemen pengguna laporan eksternal seperti investor, kreditur, donor, dan masyarakat. Berbeda dengan laporan keuangan neraca dan laporan Realisas Anggaran yang masih memungkinkan adanya manipulasi laporan, misalnya dalam bentuk window dressing, laporan Arus Kas relatif sulit untuk dimanipulasi. Laporan Arus Kas tersimpul merefleksikan peri obyektif kas, deformasi kali tunggal periode, gerakan masuk dan keluar Kas yang sangat kategoris yang bisa diuji kebenarannya tambah menginvestigasi penimbang dan Laporan Realisas Anggaran. (Bupati Rembang 2019)

Dalam menyampaikan dan menangkap Laporan Arus Kas, jantung selera hendaknya tidak ditujukan muka perkiraan peningkatan atau demosi Kas dan cocok Kas kali tunggal periode, karena perkiraan gerakan Kas neto saja bilang merelakan data yang bermakna. Yang paling penting justru adalah data berpangkal berlawanan bagian gerakan Kas secara individual. Terdapat sejumlah taktik atau hukum menjelang mengamalkan polemik Laporan Arus Kas, yaitu:

a. Analisis pertumbuhan arus kas

Analisis Arus Kas untuk setiap komponen, termasuk:

1. Analisis Arus Kas aktivitas operasi
2. Analisis Arus Kas kegiatan Investasi

3. Analisis Arus Kas Dari kegiatan pendanaan d. Analisis Arus Kas Dari Kegiatan Non gantial.
- b. Analisis Arus Kas bebas

Analisis pertumbuhan Arus Kas berguna untuk mengetahui pengembangan atau pertumbuhan uang tunai Dari setiap kegiatan selama beberapa tahun, dan dapat digunakan untuk:

1. Nilai baik apakah fundamental fiskal pemerintah atau tidak.
2. Menilai, mengevaluas dan memproyeksikan arah kebijakan keuangan regional.
3. Tingkatkan Manajemen Arus Kas di Masa depan

5.6 StanDarid Pengukuran ArusKas

StanDari untuk pengukuran Arus Kas dikelompokkan dengan parameter sebagai berikut:

- a. Arus Kas Dari aktivitas operasi yang baik seharusnya bersaldo positif dan jumlahnya meningkat Dari tahun ketahun.
- b. Arus Kas Dari aktivitas investas yang baik seharusnya.bersaldo negatif.
- c. Arus Kas Dari aktivitas Pembelanjaan mengindikasikan adanya surplus anggaran.

Bab 6

Akuntansi Kas dan Akuntansi Piutang

6.1 Definisi Kas dan Setara Kas

Mengacu pada paragraf 8 PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan yang mengartikan uang tunai dan saldo premi di bank yang dapat digunakan kapan saja untuk membayar aktivitas pemerintahan yang sangat cair yang siap dijelaskan / disalurkan kedalam uang tunai dan disalurkan bebas akibatnya adanya Perubahan yang signifikan. Kas juga mencakup semua uang yang harus dipertanggungjawabkan (UYHD) yang harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo setoran dalam bank yang dapat ditarik atau digunakan untuk membentuk angsuran. Dalam pengertian tunai ini, tu juga termasuk setara kas.

Uang dalam mengelola pemerintah tidak semua dapat diakui sebagai Kas dan disajikan dalam laporan keuangan sebagai Aset yang lancar. Uang dalam manajemen pemerintah disajikan sebagai non Aset dalam laporan keuangan sebagai Aset yang lancar. Uang dalam manajemen Pemerintah disajikan sebagai Aset non-Lancar jika uang tidak memenuhi definisi Aset Lancar dan definisi tunai pada PSAP NO 01 tentang penyajian laporan. Misalnya, uang pemerintah yang penggunaannya terbatas, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.

PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Paragraf 8 Laporan Keuangan, Mendefinisikan Setara Kas sebagai Investasi Jangka Pendek yang sangat likuid yang siap dijelaskan menjadi kaserta bebas Dari risiko Perubahan nilai signifikan. Setara dengan uang tunai di pemerintah daerah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan uang tunai Jangka Pendek atau untuk keperluan lain. Sebagai syarat-syarat setara kas, investas Jangka Pendek harus dapat segera diubah ke jumlah uang tunai yang diketahui tanpa adanya Perubahan nilai yang ditugaskan. Oleh karena itu, investas disebut setara Kas jika Investasi yang dimaksud memiliki periode jatuh tempo Kurang Dari 3 (tiga) bulan sejak tanggal akuisisi (Yahya, n.d.).

6.2 Klasifikasi Kas

Proses bisnis manajemen Kas di pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memiliki referensi dalam pemilihan aturan akuntansi mengacu pada PP nomor 39 pada tahun 2007 untuk pengelolaan uang negara bagian/regional bersama dengan Peraturan pelaksanaan regional. Secara umum, saldo tunai pemerintah meningkat karena Pendapatan atau Penerimaan pembiayaan, atau Pendapatan Transfer atau transaksi Penerimaan lainnya/inon-anggaran. Saldo Kas dikurangi jika ada Pengeluaran atau Pengeluaran pembiayaan, atau Transfer transaksi atau transaksi non-Anggaran lainnya.

Pengaturan dalam PSAP 2 tentang Pengakuan Pendapatan yang Diterima pada Akun Umum Umum Negara Bagian/iRegional, Pendapatan juga mencakup Pendapatan tunai yang diterima oleh Bendahara Penerimaan sebagai Pendapatan negarai/iwilayah yang sampai tanggal pelaporan belum disetor ke RKUN / RKUD, Dengan ketentuan Bendahara Kwitansi Bagian Dari Bun /iBud apabila, kwitansi Bendahara bukan bagian Dari Buni/iBud, Pendapatan Kas yang yang diterima oleh Bendahara Penerimaan seperti di atas tidak diakui sebagai pendapatan. Ketentuan ini diterapkan secara analog dalam pengeluaran negarai/iRegion. Ketentuan terkait Bendahara adalah bagian atau bukan bagian Dari roti / bud yang diatur oleh pemerintah.

6.2.1 Kas Pemerintah Dalam PENGELOLAAN Bendahara Umum NEGARA (BUN)

Bendahara Umum Negara adalah seorang petinggi yang diberikan amanat dalam pelaksanaan fungsi sebagai Bendahara Umum Negara. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang dan Peraturan yang ada, Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara yang mengendalikan Anggaran negara. Akun-akun Penyimpanan Uang Negara ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai Bun, sebagai akun untuk mengakomodasi semua Pendapatan Negara dan semua Pengeluaran negara di Bank Sentral adalah Rekening Umum Negara (RKUN).

Uang tunai pemerintah dikendalikan dan d bawah tanggung jawab Bendahara Umum Negara atau Kekuasaan. Bendahara umum negara dapat ditempatkan d bank sentral d akun khusus pemerintah, d Kantor Layanan Perbendaharaan Negara (KPPN), dan pada akun lain. Uang tunai d akun pemerintah khusus adalah akun atas nama Menteri Keuangan Indonesia sebagai Bun, yang merupakan akun khusus untuk keperluan tertentu sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Misalnya, akun khusus untuk mengakomodasi pinjaman penarikan muka (muka) dan hibah asing (PHLN). Uang tunai d Kantor Layanan Perbendaharaan Negara meliputi akun Penerimaan dan akun Pengeluaran tentang Bank umum/ Persepsi.

Uang tunai pada akun lain adalah akun yang dipakai sebagai penyisihan sementara Pendapatan Negara sebelum di Transfer ke RKUN atau tempat penyisihan Penerimaan dimana masih terkandung pada pihak ketiga, termasuk akun minyak dan gas (SDA) dan sumber daya non migas. Migas SDA menyumbang untuk mengakomodasi semua tanda terima dan biaya Pembayaran yang terkait dengan kegiatan bisnis Hulu migas. Akun sumber daya non-migas terdiri dari dua akun, yaitu pemasukan akun untuk pertambangan dan perikanan, dan akun pemasukan Dari Panasque.

Akun akun untuk penambangan dan perikanan dibentuk untuk mengakomodasi Pendapatan tunai yang berasal Dari pertambangan dan perikanan dan akun Penerimaan panas bumi untuk mengakomodasi Penerimaan dan membayar biaya yang terkait dengan kegiatan bisnis panas bumi.

6.2.2 Kas Pemerintah DAERAH

Uang wilayah adalah Anggaran yang dikendalikan oleh Bendahara Umum Regional termasuk Rupiah dan Valuta Asing. Manager one regional:

- a. Bendahara Umum Regional (BUD) adalah seorang petinggi yang diberikan amanat menerapkan fungsi Bendahara Umum Regional, yaitu Kepala Unit Manajemen Keuangan Regional (SKPKD),
- b. Bendahara Tanda Terima, dan
- c. Pengobatan pengeluaran.

Kas dan setara Kas dalam Pemerintah Daerah termasuk uang tunai yang dikendalikan, dioperasikan dan d bawah tanggung jawab Bendahara Umum Regional (BUD) dan harta yang dikendalikan, dikelola dan d bawah tanggung jawab Selain Bendahara umum regional, misalnya Bendahara Pengeluaran dan Bertanggung jawab atas Bendahara umum regional terdiri Dari:

- a. Saldo rekening Kas regional, yaitu saldo akun dalam bank ditetapkan oleh kepala daerah berTujuan untuk mengakomodasi pemasukan dan biaya.
- b. Setara kas, antara lain dalam bentuk obligasi negara (matahari) / obligasi dan deposito Kurang Dari 3 bulan, yang dikelola oleh Bendahara umum regional

6.2.3 Kas Pemerintah Di Luar Pengelolaan Bendahara Umum Negara/ Daerah (BUN/D)

Perbendaharaan negara yang penguasaan, penatausahaan, dan tanggung jawabnya dilakukan oleh Selain Bendahara umum Negara/daerah meliputi:

- a. Tunai di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan bukan sebahagian Dari pada Bun.
- b. Tunai di Bendahari Pengeluaran, apabila Bendahari Pengeluaran bukan sebahagian Dari pada Bun.
- c. Saldo tunai lain yang diterimakeranapenyelenggaraan.
- d. Tunai ke atas perkhidmatan umum / badan umum.

6.3 Pengakuan Kas

Terkait dengan pengakuan Aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan Aset dilakukan:

- a. Ketika potensi untuk manfaat ekonomi d masa depan diperoleh pemerintah daerah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur oleh wilayah tersebut;

- b. Ketika dia menerima atau kepemilikannya dan atau pelestariannya bergerak. in berart bahwa dapat dikatakan bahwa Kas dan setara Kas diakui ketika uang tunai dan setara Kas diterima dan / atau dibayar / dibayar.

6.4 Definisi Piutang

Piutang adalah salah satu Elemen Aset Lancar dalam neraca perusahaan yang timbul karena penjualan barang, kejadian atau kredit untuk debitur yang pembayarannya terhadap Pembayaran diberikan dalam waktu 30 hari hingga 90 hari. Dalam pengertian luas, piutang adalah permintaan untuk pihak lain dalam bentuk uang, barang atau kejadian yang dijual dengan kredit. Keragaman dalam akuntansi Lebih sempit Dari pemahamannya, Yaitu untuk menunjukkan tuntutan pada pihak luar yang diperkirakan akan diselesaikan dengan menerima sejumlah uang tunai.

6.5 Klasifikasi Piutang

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013. Piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Piutang Pendapatan. Piutang yang timbul Dari pendapatan, terdiri Dari:
- 1) Piutang pajak daerah
 - 2) Piutang retribusi
 - 3) Piutang lain-lain yang sah
 - 4) Piutang Transfer pemerintah pusat
 - 5) Piutang Transfer pemerintah lainnya
 - 6) Piutang Transfer pemerintah daerah lainnya
 - 7) Piutang pendapatan lain-lain
- b. Piutang Lainnya
- 1) Bagian Lancar tagihan jangka panjang
 - 2) Bagian Lancar tagihan Jangka panjang kepada entitas lainnya
 - 3) Bagian Lancar tuntutan ganti rugi daerah
 - 4) Uang muka.

6.6 Pengakuan Piutang

Piutang diakui ketika adanya tuntutan atau kewajiban untuk menagih uang atau keuntungan ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

- a. Menerbitkan surat ketetapan atau arsip yang sah; atau
- b. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- c. Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

6.7 Prosedur Akuntansi Kas dan Piutang

Dalam jurnal (Ratela: 2015), Akuntansi Penerimaan Kas merupakan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah antara lain diperoleh Dari transaksi berikut ini:

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah

- c. Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah antara lain meliputi penjualan Aset daerah yang dipisahkan, Penerimaan bunga deposito, Penerimaan kejadian giro, denda keterlambatan pelaksanaan kegiatan.

Sistem Akuntansi Pengeluaran Tunai adalah suatu sistem yang berguna dalam melakukan pencatatan semua transaksi Pengeluaran uang tunai. Administrasi Biaya Tunai adalah serangkaian kegiatan untuk menerima, menghemat, menyetor, membayar, mengajukan dan memperhitungkan Pengeluaran uang dalam pengelolaan SKPKD (Unit Kerja Manajemen Keuangan Daerah) dan / atau SKPD.

Prosedur Pengeluaran sistem dan regional melalui Pengeluaran UP / GU dan LS banyak pihak terkait yang terlibat, dan beberapa surat atau dokumen diperlukan selama proses Pembayaran tunai dan membuat surat akuntabilitas administrasi dan fungsional untuk penggunaan dana. Mekanisme Pengeluaran Tunai dapat diringkas dalam tabel berikut.

Menurut Permendagri 64/2013 "tentang kebijakan akuntansi akuntansi pemerintah daerah". Pihak terkait dengan sistem akuntansi akuntansi termasuk Petugas Manajemen Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Bendahara Tanda Terima SKPD.

- a. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Dalam sistem akuntansi piutang, PPK-SKPD melaksanakan fungsi akuntansi SKPD, memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) Mencatat transaksi/kejadian piutang berdasarkan Bukti-Bukti transaksi yang sah dan valid ke Buku Jurnal LRA dan Buku Jurnal LO dan Neraca.
 - 2) Melakukan posting jurnal-jurnal transaksi/kejadian Pendapatan LO dan Pendapatan LRA kedalam Buku Besar masing-masing rekening.
 - 3) Menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri Dari Laporan Realisas Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Neraca dan Catatan atas Laporan keuangan.
- b. Bendahara Penerimaan SKPD.
- 1) Mencatat dan membukukan semua Penerimaan ke dalam Buku Kas Penerimaan SKPD.
 - 2) Membuat SPJ atas pendapatan.

Tabel 1.6: Dokumen yang digunakan

Uraian	Dokumen
Piutang pajak daerah	SKP daerah/SKPDKB/dokumen yang dipersamakan
Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	Hasil RUPS/dokumen yang dipersamakan
Piutang lain-lain PAD yang sah: Jasa giro/ bunga deposito Tuntutan ganti kerugian daerah Piutang hasil eksekusi atas jaminan	Nota kredit/sertifikat deposito/ dokumen yang dipersamakan SK pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan

Piutang transfer pemerintah pusat:	
Bagi hasil pajak	PMK
Bukan hasil pajak	PMK
DAU	Perpres
DAK	PMK
Bukan hasil pajak	PMK
Piutang transfer pemerintah lainnya:	
Dana otsus	PMK
Data penyesuaian	PMK
Piutang dana bos	Keputusan kepala daerah / PMK/dokumen yang dipersamakan
Piutang transfer pemerintah daerah lainnya	Keputusan kepala daerah/ dokumen yang dipersamakan
Bagi hasil pajak	Keputusan kepala daerah/ dokumen yang dipersamakan
Bantuan keuangan	Keputusan kepala daerah/ dokumen yang dipersamakan
Piutang pendapatan lainnya	Dokumen yang dipersamakan
Bagian lancar tagihan jangka panjang	Surat keputusan kepala daerah/ dokumen yang dipersamakan
Bagian lancar tagihan pinjaman jangka panjang kepada entitas lainnya	Surat keputusan kepala daerah/ dokumen yang dipersamakan
Bagian lancar tagihan penjualan angsuran	Kontrak/perjanjian penjualan secara angsuran/dokumen yang dipersamakan
Bagian lancar tuntutan ganti kerugian daerah	Surat keputusan pembebanan kerugian/dokumen yang dipersamakan
Uang muka	SP2D/nota debet/dokumen yang dipersamakan

6.8 Journal Stan Dari

Telah diterima dokumen berupa PMK/Perpres/Surat Keputusan Kepala Daerah/Kontrak/Surat Perjanjian/Dokumen yang dipersamakan dan belum diterima Pembayaran maka fungsi akuntansi akan melakukan jurnal stan Dari: (Menteri Keuangan Nomor 255/PMK 2019)

Tabel 2.6: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Piutang	XXX	
		XXX	Pendapatan..... LO		XXX

Telah diterima dengan catatan kredit Dari bank / Bukti Pembayaran / Bukti Penerimaan Kas / dokumen yang disamakan dimana Transfer ke harta regional, oleh Bendahara Penerimaan akan merekam sebagai Penerimaan Kas untuk Pembayaran kembali piutang, fungsi akuntansi Melakukan jurnal stan Dari:

Tabel 3.6: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Kas di kas daerah	XXX	
		XXX	Piutang ...		XXX

Tabel 4.6: Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debit	Kredit
XXX	XXX	XXX	Perubahan SAL	XXX	
		XXX	Pendapatan LRA		XXX

Setiap Pengeluaran negara harus dilaporkan dan diperhitungkan meskipun hanya satu rupiah yang diuraikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah (LKP). LKP diaudit oleh CPC, bahkan jika perlu diperiksa secara mendalam. Untuk membuatnya Lebih mudah untuk membuat LKP yang andal dan bertanggung jawab, sistem pelaporan terintegrasi diperlukan dengan penerapan Pengeluaran negara. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Kantor Vertikal, Yaitu Kantor Regional (Kanwil) dan KPPN, berusaha untuk Lembaga Kementerian / Negara (K / L) untuk membuat LKP StanDari sesua dengan ketentuan undangan. (Antoro 2017)

Serangkaian sistem bersama dengan file komputer telah disiapkan untuk pembuatan LKP oleh masing-masing K / L yang dimula Dari satkersnya.in memungkinkan K / L untuk dapat mengembangkan laporan keuangan meskipun memiliki ribuan satker d seluruhindonesia bahkan d daerah terpencil. Selaintu, pemerintah telah menerapkan laporan keuangan Berbasis kecelakaan,ni membuat laporan keuangan menghadirkan berbagai transaksi yang sesua dengan kondisi aktual. Dengan demikian laporan keuangan pemerintah menjadi Lebih akurat, transparan dan akuntabel.

Bab 7

Akuntansi Persediaan

7.1 Pengertian Akuntansi Persediaan

PSAP Nomor 05 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa persediaan adalah Aset Lancar yang berbentuk barang atau perlengkapan yang dapat mendukung suatu kegiatan operasional pemerintah yang ber Tujuan sebagai dukungan kegiatan operasional dan produk-produk yang direncanakan untuk dijual atau berpotensi untuk dikirim sehubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. (Peraturan Pemerintah 2010)

7.2 Klasifikasi Persediaan

Suatu sumber daya yang dapat didelegasikan sebagai persediaan apabila sumber daya tersebut memenuhi salah satu aturan yang dinyatakan dalam PSAP Nomor 05, yaitu:

- Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan. Yang termasuk kategori Yaitu barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tidak habis pakai seperti Komponen peralatan dan pipa, dan barang bekaspakai seperti cadang bekas;
- Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam siklus produksi. Persediaan yang termasuk kategori kelompokin mencakup bahan-bahan yang digunakan dalam siklus produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, dan lain-lain;
- Barang dagang dalam siklus penciptaan direncanakan untuk dijual atau disampaikan kepada masyarakat umum. Contoh persediaan yang termasuk dalam kelompokin adalah alat-alat pertanian setengah jadi;
- Barang-barang yang disimpan tersedia untuk dibeli atau diangkut ke masyarakat umum sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Contohnya adalah hewan/tanaman.

Persediaan mencakup bendan ataupun peralatan yang dibeli serta ditaruh buat digunakan, misalnya bendan habis gunakan semacam perlengkapan tulis kantor, bendan tidak habis pakaiseperti Komponen perlengkapan serta pipa, serta bendan Sisa gunakan semacam Komponen sisa.

Dalam perihal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan pula meliputi bahan yang digunakan dalam proses penciptaan semacam bahan baku pembuatan alat- alat pertanian. Barang hasil proses penciptaan yang belum berakhir dicatat selaku persediaan, contohnya alat- alat pertanian separuh jadi. Dalam perihal pemerintah menaruh bendan buat Tujuan Cadangan strategis seperti Cadangan tenaga(misalnya minyak) ataupun buat Tujuan berjaga- jaga semacam Cadangan pangan(misalnya beras), beberapa barang diartikan diakui selaku persediaan. (Antoro 2017)

Persediaan dalam keadaan rusak ataupun usang tidak dilaporkan dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

7.3 Sistem Akuntansi Persediaan

Akuntansi Persediaan pada SKPD meliputi pencatatan serta pelaporan atas transaksi- transaksi yang terpaut dengan Persediaan. Adan 2 tata cara yang mempengaruhi: Yaitu sistem dan prosedur akuntansi persediaan semacam yang di jelaskan pada subbab tadinya, yaitumetode perpetual serta periodik.

7.4 Pihak-Pihak yang Terkait Akuntansi Persediaan

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi persediaan antara lain adalah:

a. Bendahara Barang atau Pengurus Barang

Dalam sistem akuntansi persediaan, Bendahara benda/ pengurus benda bertugas untuk mempersiapkan serta mengantarkan arsip-arsip atas pengelolaan persediaan.

b. Bendahara Pengeluaran

Dalam sistem akuntansi persediaan, Bendahara Pengeluaran bertugas untuk mempersiapkan dan menyampaikan arsip-arsip atas transaksi tunai yang berkaitan dengan persediaan.

c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat pelaksana teknis kegiatan bertugas untuk menyiapkan arsip atas beban Pengeluaran pelaksanaan pengadaan persediaan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

Dalam sistem akuntansi persediaan, pejabat penatausahaan keuangan SKPD bertugas untuk melakukan proses akuntansi persediaan yang dimulai dari jurnal hingga penyajian laporan keuangan SKPD.

7.5 Dokumen yang Digunakan

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi persediaan meliputi:

a. Bukti Belanja Persediaan

Dokumen ini berisikan sumber-sumber sebagai pencatatan jurnal pengakuan beban persediaan dan Belanja persediaan dengan cara Pembayaran UP.

b. Berita Acara Serah Terima Barang

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal atas pengakuan beban persediaan dengan cara Pembayaran LS.

c. Berita Acara Pemeriksaan Persediaan

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan jurnal penyesuaian untuk pengakuan beban persediaan setelah dilakukannya stock opname

d. SP2D LS

Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk pengakuan Belanja persediaan dengan cara Pembayaran LS..

7.6 Jurnal Standar

7.6.1 Pencatatan Persediaan dengan Metodeperiodik

Pembelian persediaan bisa dicoba dengan memaka UP(Duit Persediaan) ataupun LS (Langsung). Kala SKPD melaksanakan pembelian persediaan dengan menggunakan UP, Bendahara Pengeluaran SKPD hendak menyerahkan fakta Belanja persediaan kepada PPK SKPD. Fakta transaksi hendak jadi dasar untuk PPK SKPD buat melaksanakan pengakuan persediaan. PPK SKPD hendak mencatat jurnal.

Tabel 1.7: Jurnal LO dan Neraca.

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	Xxx	Persediaan	xxx	
		Xxx	Kas di bendahara pengeluaran		xxx

Tabel 2.7: Jurnal LRA

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	Xxx	Persediaan	xxx	
		Xxx	Kas di bendahara pengeluaran		xxx

Jika SKPD membeli saham dengan menggunakan LS, maka pengakuan saham didasarkan pada Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang menjadi dasar pembenaran PPK-SKPD untuk setiap hari membuat catatan:

Tabel 3.7: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Persediaan	xxx	
		xxx	Utang belanja barang da jasa		xxx

Pada saat SP2D LS untuk angsuran provisi telah diberikan, PPK-SKPD akan mendiskontokan Hutang penggunaan dengan membuat jurnal:

Tabel 4.7: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	debit	kredit
xxx	xxx	xxx	Utang belanja barang dan jasa	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

Tabel 5.7: Jurnal LRA

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	debit	kredit
xxx	xxx	xxx	Belanja persediaan	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

Menjelang akhir periode (bulanan, triwulanan, setengah tahunan), sebelum mengumpulkan laporan keuangan, divisi gudang akan melakukan stock take untuk mengetahui Sisa stok. Berdasarkan berita acara hasil estimasi saham akhir tahun (stockopname), PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Tabel 6.7: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	kredit
xxx	xxx	xxx	Beban persediaan	xxx	
		xxx	Persediaan (yang terpakai)		xxx

7.6.2 Pencatatan Persediaan dengan Metodeperpetual

Pada saat SKPD membeli persediaan menggunakan UP, petugas keuangan SKPD pengguna akan menyerahkan Bukti Pengeluaran saham kepada PPK SKPD. Konfirmasi pertukaranni akan menjadi alasan bagi PPK SKPD untuk menjurnal:

Tabel 7.7: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	Xxx	Persediaan	xxx	
		Xxx	Kas di bendahara pengeluaran		xxx

Tabel 8.7: Jurnal LRA

Tanggal	Nomor bukti	Nomor rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Belanja persediaan	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

Jika SKPD membeli persediaan dengan menggunakan LS, persediaan diakui sesuai dengan Berita Acara Serah Terima Barang. Berita Acara Serah Terima Barang tersebut merupakan dasar bagi PPK-SKPD sehingga dilakukan penjurnalan:

Tabel 9.7: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Persediaan	xxx	
		xxx	Utang belanja barang dan jasa		xxx

Ketika SP2D LS untuk Pembayaran persediaan terbit, PPK-SKPD akan menjurnal:

Tabel 10.7: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	debit	kredit
xxx	xxx	xxx	Utang belanja barang dan jasa	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

Tabel 11.7: Jurnal LRA

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	debit	kredit
xxx	xxx	xxx	Belanja persediaan	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

Mengingat adanya arsip yang memperjelas pemanfaatan/pemakaian stok (untuk metode perpetual), misalnya Kartu Inventaris Barang (KIB), Bukunventaris (BI), dan kartu kendali barang dagangan, PPK SKPD akan melihat ukuran saham yang digunakan dengan penjurnalan:

Tabel 12.7: Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor bukti	Kode rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Beban persediaan	xxx	
		xxx	Persediaan		xxx

7.7 Penyajian Persediaan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Berikut ini adalah.

ILUSTRASI PENYAJIAN

PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN /KOTA NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam Rupiah)		
Uraian	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Kas Daerah	xxx	xxx
Kas di Bendahara Pengeluaran	xxx	xxx
Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	xxx
Investasi Jangka Pendek	xxx	xxx
Piutang Pajak	xxx	xxx
Piutang Retribusi	xxx	xxx
Penyisihan Piutang	(xxx)	(xxx)
Belanja Dibayar Dimuka	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	xxx	xxx
Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	xxx	xxx
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	xxx	xxx
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	xxx	xxx
Piutang Lainnya	xxx	xxx
Persediaan	xxx	xxx
Jumlah Aset Lancar (4 s/d 19)	xxx	xxx

Gambar 1.7: Contoh penyajian persediaan dalam Neraca Pemerintah Daerah. sumber : (Verma et al. 2016)

7.8 Pengungkapan Persediaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mengungkapkan:

- Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam meperkirakan stok;
- Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau kadaluwarsa.

Persediaan yang memiliki kondisi cacat atau kadaluarsa belum diungkapkan dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang diklaim oleh perusahaan dependen untuk membuat sumber daya tetap dibebankan ke akun Konstruksi Dalam Pekerjaan jika sampai dengan tanggal pengungkapan pengembangan belum selesai.

Bab 8

Akuntansi Investasi dan Dana Bergulir

8.1 Pengertian Investasi

Investasi adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah sehubungan dengan melayani daerah setempat.

Pemerintah melakukan investas dimaksudkan antara lain untuk memperoleh Pendapatan dalam Jangka panjang atau memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investas Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas. Terdapat beberapa Jenis investas yang dapat diBuktiikan dengan sertifikat atau dokumen lain yang serupa. Hakikat suatu investasi dapat berupa pembelian surat utang baik Jangka Pendek maupun Jangka panjang, serta instrumen ekuitas.

Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus Anggaran untuk memperoleh Pendapatan dalam Jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investas Jangka Pendek dalam rangka manajemen Kas (Verma et al. 2016).

8.2 Klasifikasi Investasi di Pemerintahan

Investasi pemerintah diklasifikasikan berdasarkan Jangka waktunya menjadi dua Yaitu investasi Jangka Pendek dan investasi Jangka panjang investasi Jangka Pendek merupakan kelompok Aset Lancar sedangkan investasi Jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Pos-pos investas menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 06 tentang investasi antara lain:

a. Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah sebuah investasi yang memiliki ciri tersendiri yang cenderung cepat ditukar/dibagikan dalam waktu 90 hari hingga satu tahun. Usaha sesaat Biasanya digunakan untuk Tujuan uang tunai para eksekutif dimana pemerintah terdekat dapat menjual spekulasi jika kebutuhan uang tunai muncul. Spekulasi sesaat umumnya baik-baik saja investasi Sementara tidak sama dengan Uang Tunai dan Setara Tunai. Sebuah usaha disebut Kas dan Setara Kas jika spekulasi memiliki perkembangan d bawah 90 hari sejak tanggal pengamanan. Perolehan proteksi yang merupakan bahaya tinggi bagi otoritas publik, karena dipengaruhi oleh Perubahan biaya proteksi pasar, dikecualikan Dari spekulasi sementara. Jenis usaha yang dikecualikan Dari kelompok spekulasi.

Investasi Jangka Pendek adalah spekulasi yang memiliki kualitas yang cenderung cepat ditukar/dibagikan dalam 90 hari hingga satu tahun. Spekulasi sesaat Biasanya digunakan untuk uang tunai Tujuan dewan dimana pemerintah daerah dapat menjual usaha jika kebutuhan uang tunai muncul. Usaha sementara Biasanya aman investasi Sementara tidak sama dengan Uang Tunai dan Setara Tunai. Suatu usaha disebut Kas dan Setara Kas jika spekulasi memiliki perkembangan d bawah 90 hari sejak tanggal Perolehan. Perolehan proteksi yang merupakan bahaya tinggi bagi otoritas publik, karena dipengaruhi oleh varians dalam biaya proteksi pasar, dikecualikan Dari usaha sementara. Jenis usaha yang dikecualikan Dari kelompok spekulasi sementara meliputi:

- 1) Surat berharga yang dibeli pemerintah dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha, misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan Modal saham pada suatu badan usaha;
- 2) Surat berharga yang dibeli pemerintah untuk Tujuan menjaga hubungan kelembagaan yang baik dengan pihak lain, misalnya pembelian surat berharga yang dikeluarkan oleh suatu lembaga baik dalam negeri maupun luar negeri untuk menunjukkan partisipasi pemerintah; atau
- 3) Surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan Kas Jangka pendek.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai Investasi Jangka pendek, antara lain terdiri atas: (a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); (b) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah Jangka Pendek oleh pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka panjang merupakan investasi usaha yang pengembangannya memiliki waktu Lebih Dari satu tahun. Investasi Jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi Jangka panjang nonpermanen merupakan investasi Jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka panjang permanen merupakan investasi Jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Investasi permanen yang dibuat oleh otoritas publik adalah usaha yang tidak diharapkan untuk ditukar, namun untuk memperoleh keuntungan serta dampak Besar dalam Jangka panjang atau berpotensi mengikuti koneksi institusional. Spekulasi Jangka panjang dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah dalam organisasi negara/provinsi, substansi sedunia dan unsur-unsur bisnis lainnya yang tidak diklaim oleh negara, yang dapat berupa perlindungan (saham) dalam perseroan terbatas dan organisasi non-perindungan, terutama kepemilikan Modal bukan sebagai sebuah penawaran dalam organisasi non-organisasi
- b) Investasi permanen lainnya yang diklaim oleh otoritas publik untuk menghasilkan Pembayaran atau mengembangkan administrasi Lebih lanjut ke daerah setempat. Usaha tidak tahan lama yang dilakukan oleh badan publik antara lain dapat berupa:
- c) Perolehan obligasi atau perlindungan kewajiban Jangka panjang yang diharapkan akan diadakan sampai dengan tanggal perkembangannya oleh otoritas publik;
- d) Kepentingan adalah tugas yang sedang dikembangkan yang dapat dialihkan kepada pihak luar;
- e) Harta benda yang disita oleh badan umum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah, misalnya bantuan Modal kerja pemintalan untuk rapat-rapat daerah;
- f) Spekulasi lain yang tidak tahan lama, yang diperkirakan tidak akan diklaim oleh otoritas publik secara berkelanjutan, misalnya, dukungan nilai yang direncanakan untuk pemulihan/penyelamatan moneter

8.3 Pihak-Pihak yang Terkait dalam Sistem Akuntansi pada Pemerintah

Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi Investasi pada Pemerintah Pusat antara lain adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Bendahara Umum Negara (BUN).

a. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

- 1) Mereklasifikasi saldo Kas yang ditempatkan pada investas dalam Buku Besar Akrua.
- 2) Menjurnal perolehan Investasi Jangka panjang.
- 3) Menjurnal dan membukukan Pendapatan hasil investas yang diterima, dividen, pelepasan investasi, dan keuntungan atau kerugian selisih hasil pelepasan investasi.

b. Bendahara Umum Negara (BUN)

- 1) Mereklasifikasi saldo Kas yang ditempatkan pada investas dalam Buku Besar Akrua

- 2) Menjurnal Penerimaan Kas dan membukukannya d Buku Besar Akreal dan Buku Besar Kas.
- 3) Mereklasifikasi saldoInvestasi yang dikembalikan ke Kas dalam Buku Besar Akreal.Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansiInvestasiipada Pemerintah Daerahantara lain Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD) dan PPKD.

c. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD (PPK-PPKD)

Dalam sistem akuntansiInvestasii, PPK-PPKD melaksanakan fungsi akuntansi PPKDyang memiliki tugas sebagai berikut:

- 1) Mencatat transaksi/kejadianinvestas sesua pada Bukti transaks yang sah ke Buku Jurnal Umum.
- 2) Memposting jurnal-jurnal transaksi/kejadianinvestas ke dalam Buku Besar Dari setiap catatan (rincian objek).
- 3) Membuat laporan keuangan, yang terdiri Dari Laporan Realisas Anggaran (LRA),Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan SAL (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca dan Catatan atas LaporanKeuangan (CaLK).

d. PPKD

Dalam sistem akuntansiInvestasii, PPKD memiliki tugas:

- 1) Penandatanganan rangkuman Anggaran PPKD sebelum diakomodir dalam siklus konsolidasi/serikat yang dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD
- 2) menandatangani surat Pernyataan tanggung jawab PPKD.

8.4 Dokumen yang Digunakan

	Uraian	Dokumen
Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham	Sertifikat Saham/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Deposito	Sertifikat Deposito/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SUN	Sertifikat Obligasi/SUN/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SBI	Sertifikat SBI/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam SPN	Sertifikat SPN/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi dalam Obligasi	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/Dokumen yang Dipersamakan

Uraian		Dokumen
	Investasi dalam Proyek Pembangunan	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Dana Bergulir	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Deposito Jangka Panjang	SP2D-LS (jika tunai)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Non Permanen Lainnya	SP2D-LS (jika tunai), BAST (jika berupa aset)/Dokumen yang Dipersamakan
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada BUMD	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan
	Investasi Permanen Lainnya	SP2D-LS (jika tunai)/BAST (jika berupa aset)/Nota Kredit/ Dokumen yang Dipersamakan

Gambar 1.8: Tabel Penyajian disajikan dokumen utama terkait dengan sistem akuntansi investasi pada PPKD

8.5 Metode Penilaian Investasi

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga teknik, yaitu:

a. Metode biaya

Investasi pemerintah yang dinilai menggunakan strategi biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Keuntungan dari investasi tersebut dipersepsikan atas porsi pengembalian yang didapat dan tidak mempengaruhi ukuran kepentingan pada substansi/unsur sah usaha yang bersangkutan.

b. Metode ekuitas

Investasi pemerintah yang dinilai menggunakan metode Ekuitas akan dicatat atas biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurang dengan porsi keuntungan atau kerugian sebesar tingkat kepemilikan pemerintah setelah tanggal pengadaan. Porsi keuntungan yang diperoleh oleh otoritas publik, kecuali keuntungan yang didapat sebagai penawaran, akan mengurangi nilai spekulasi pemerintah dan tidak dinyatakan sebagai bayaran. Penyesuaian terhadap nilai spekulasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan ventura pemerintah, misalnya, Perubahan yang muncul dari dampak perdagangan asing dan revaluasi sumber daya tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai Realisas bersih akan dicatat sebesar nilai Realisas yang akan diperoleh pada akhir periode investasi.

Metode nilai Realisas bersih yang digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan Kurang Dari 20% menggunakan metode biaya.

- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan Kurang Dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- 3) Kepemilikan Lebih Dari 50% menggunakan metode ekuitas.
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, aturan tingkat kepemilikan saham bukanlah Komponen penentu dalam memilih teknik investasi, namun yang Lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

8.6 Jurnal Stan Dari Pemerintah Pusat

a. Perolehan investasi

Pada saat perolehan Investasi Jangka panjang, KPA menjurnal dan membukukan d Buku Besar Akrua dan Buku Besar Kas dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pengeluaran Investasi Pemerintah	xxx	
		xxx	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Kuasa BUN menjurnal Pengeluaran Kas dan membukukan d Buku Besar Akrua dan Buku Besar Kas dengan jurnal Pengeluaran kas.

b. Pendapatan Hasil investasi

Pada saat Pendapatan Kas hasil investas Jangka panjang/dividen diterima, KPA menjurnal dan membukukan d Buku Besar Akrua dan Buku Besar Kas dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
		xxx	Pendapatan Bagian Laba BUMN		xxx

Kuasa BUN menjurnal Penerimaan Kas dan membukukan di Buku Besar Akrua dan Buku Besar Kas dengan jurnal Penerimaan kas.

c. Pelepasan investasi

Pada saat pelepasan Investasi Jangka panjang, KPA menjurnal dan membukukan di Buku Besar Akrua dan Buku Besar Kas dengan jurnal:

Tanggal	Nomor Bukti	Akun	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Diterima dari Entitas Lain	xxx	
		xxx	Penerimaan Hasil Privatisasi		xxx

Kuasa BUN menjurnal Penerimaan Kas dan membukukan d Buku Besar Akrual dan Buku Besar Kas dengan jurnal Penerimaan kas.

8.7 Jurnal StanDari Pemerintah Daerah

a. Perolehan investasi

1) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Pendek)

Ketika pemerintah daerah melakukan pembentukan/pembelianInvestasi Jangka Pendek dalam rangka manajemen kas, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	Xxx	xxx	Investasi Jangka Pendek	xxx	
		xxx	Kas di kas daerah		xxx

2) Perolehan Investasi (Investasi Jangka Panjang)

Perolehan Investasi dicatat ketika nilaiInvestasi dalam pedoman direalisasikan. Pencatatan dilakukan oleh fungsi akuntansi PPKD berdasarkan SP2D- LS (jika tunai) yang menjadi dasar pencairan Pengeluaran Pembelanjaan untuk investasi tersebut. Fungsi akuntansi PPKD mencatat Pendapatan investasi Jangka panjang dapat dicatat sebagai berikut:

a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pengeluaran Pembiayaan – Dana Bergulir	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

b. Investasi Jangka Panjang Permanen

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Panjang Permanen	xxx	
		xxx	Kas di Kas Daerah		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Pengeluaran Pembiayaan –Penyertaan Modal/Investasi Pemda	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

Hasil investasi

1) Hasil investasi Jangka Pendek

Hasil investasi Jangka Pendek berupa Pendapatan bunga. Pendapatan bungain Biasanya diperoleh secara bersamaan sebagai penghapusanInvestasi Jangka Pendek tersebut, sehingga pembahasannya akan digabungkan dalam sub bagian mengenai penghapusaninvestasi.

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Pendapatan Bunga...- LO		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan Bunga...- LRA		Xxx

2) Hasilinvestas Jangka Panjang

a) Metode Biaya

Dalam metode biaya, laba/rugi perusahaan tidak berpengaruh terhadap investasi yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah hanya menerima keuntungan yang dis oleh perusahaan. Berdasarkan pengumuman pembagian dividen yang dilakukan oleh perusahaan investee, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan yang didapat pada periode berjalan.Selanjutnya fungsi akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		xxx

Pada saat perusahaaninvestee membagikan dividen tunai kepada pemerintah daerah, fungsi akuntansi PPKD mencatat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA		xxx

b) Metode Ekuitas

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan tempat pemerintah daerah berinvestasi, PPKD dapat mengetahui jumlah keuntungan perusahaan pada periode berjalan. Dalam metode ekuitas, dividen yang diperoleh perusahaan dapat berpengaruh terhadap jumlah investas yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Ketika Laba diumumkan oleh perusahaan, fungsi akuntansi PPKD mencatat aktivitas tersebut dengan melakukan penjumlahan sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Investasi Jangka Panjang	xxx	
		xxx	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		xxx

Pada saat perusahaan membagikan dividen, fungsi akuntansi PPKD akan mencatat Penerimaan dividen (tunai) tersebut dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Investasi Jangka Panjang		xxx

c) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Ketika perolehan premi Dari Investasi Jangka panjang non permanen (misalnya Pembayaran bunga Dari Cadangan berputar) telah diperoleh, Fungsi Akuntansi PPKD mencatat Penerimaan bunga dalam Buku harian:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LO		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan Bunga Dana Bergulir – LRA		xxx

3) Pelepasan investasi

a) Pelepasan Investasi Jangka Pendek

Pada saat penghapusan Investasi Jangka pendek, sesuai dengan Bukti transaksi yang dimiliki oleh PPKD, Fungsi Akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Pendapatan ... – LO		xxx
		xxx	Investasi Jangka Pendek		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Pendapatan ... – LRA		xxx

b) Pelepasan Investasi Jangka Panjang

Pada saat melakukan penghapusan Investasi Jangka panjang, misalnya saham, sesuai dengan Bukti transaksi yang dimiliki oleh PPKD, fungsi akuntansi PPKD melakukan pencatatan dengan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca (Jika Surplus)

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO		xxx
		xxx	Investasi Jangka Panjang		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Penerimaan Pembiayaan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		xxx

8.5 Pengertian Dana Bergulir

Adapun karakteristik Dari dana bergulir adalah sebagai berikut:

- a. Dana tersebut merupakan bagian Dari keuangan negara/daerah.

Dana bergulir dapat bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya Dari masyarakat atau hibah Dari luar negeri. Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal Dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dan atau diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.

- b. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua Pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi Anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)

- c. Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh

Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA). Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

- d. Dana tersebut merupakan dana yang dialokasikan kepada masyarakat, terlepas Dari ada tidaknya nilai tambah, diambil kembali Dari masyarakat, kemudian dana tersebut dikembalikan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat, dan lain-lain (perdagangan), yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian rakyat dan keperluan lainnya. Keunikan Dari dana bergulir: Dana tersebut merupakan bagian Dari keuangan negara/daerah. Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan. Dana tersebut wajib dikuasai, dimiliki dan/atau dikuasai oleh pengguna Anggaran (PA/KPA). Dana ini adalah dana yang dialokasikan kepada masyarakat, dana yang bernilai tambah atau tidak bernilai tambah diperoleh Dari masyarakat, kemudian dana disalurkan kembali kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dan seterusnya (perdagangan atau bergulir). Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

- e. Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.

Pemerintah dapat menarik dana bergulir yang dilakukan oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk memberhentikan pergulirannya atau memutar kembali ke masyarakat.

Bab 9

Akuntansi Aset Tetap-Bagian 1 (Perolehan dan Pemanfaatan)

9.1 Pengertian Aset Tetap

Aset tetap merupakan bentuk Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat Lebih Dari 12 bulan yang dapat digunakan, atau melakukan kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, penyusutan adalah alokasi yang sistematis terhadap nilai perolehan suatu Aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Penyusutan adalah penyesuaian nilai yang terus menerus yang berhubungan dengan penurunan kapasitas suatu aset, baik penurunan kualitas, kuantitas, maupun nilai. Penurunan kapasitas terjadi karena Aset digunakan dalam operasional suatu entitas (Verma et al. 2016)

Dalam melaksanakan penyusutan dengan cara mengalokasikan biaya perolehan suatu Aset menjadi beban penyusutan secara periodik sepanjang masa manfaat aset. Tanpa penyusutan, nilai Aset tetap dalam neraca akan Lebih saji (overstated). Dalam Buletin Teknis SAP Nomor 5 tentang Penyusutan disebutkan bahwa adanya penyusutan dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian Aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.

Tidak semua Aset tetap memerlukan penyusutan karena tidak semua Jenis Aset tetap mengalami penurunan nilai. Beberapa Jenis Aset tetap justru dapat meningkatkan nilainya seiring berjalannya waktu. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, disebutkan bahwa tanah dan konstruksi dalam pengerjaan merupakan dua Jenis Aset tetap yang tidak disusutkan. (Peraturan Pemerintah 2010)

9.2 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan terhadap sifat maupun fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset tetap yaitu sebagai berikut: (Pemerintah 2005)

- a. Tanah yang dapat dikelompokkan sebagai Aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan kondisi siap dipakai.
- b. Peralatan dan mesin terdiri Dari, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang memiliki nilai signifikan dan masa manfaatnya Lebih Dari 12 bulan dalam kondisi siap digunakan.
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Gedung dan bangunan meliputi seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan.
- e. Jalan, rigasi dan jaringan telah dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.
- f. Aset tetap yang lainnya terdiri Dari Aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset tetap di atas, namun diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan meliputi Aset tetap yang sedang melakukan proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

9.3 Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa yang akan datang dan dapat diperoleh serta nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset tetap sangat andal apabila Aset tetap telah diterima atau diserahkan terhadap hak kepemilikannya dan pada saat penguasaannya berpindah. Namun perolehan atas Aset tetap belum didukung dengan Bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, misalnya pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya dinstansi berwenang, maka Aset tetap tersebut harus diakui pada saat mendapatkan Bukti bahwa penguasaan atas Aset tetap tersebut telah berpindah, seperti telah terjadi Pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan and (KSAP) 2007) Adan beberapa yang dapat diakui sebagai Aset tetap harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud
- b. Memiliki masa manfaat Lebih Dari 12 bulan
- c. Biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas
- e. Memperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
- f. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya atau ongkos untuk dipelihara; dan
- g. Nilai rupiah pembelian barang material atau Pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset tetap yang telah ditetapkan.

Pengeluaran Belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset tetap d atas akan diperlakukan sebagai persediaan/Aset lainnya. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset tetap dan harus disajikan d pos Aset lainnya sesua dengan nilai tercatatnya.

9.4 Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Dalam keadaan suatu Aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh Dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset tetap untuk pembangunan dengan cara swakelola terdiri Dari, biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, serta biaya tidak langsung yang meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, peralatan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan biaya terkait konstruksi lainnya yang terjadi dalam pembangunan Aset tetap tersebut. Apabila Aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, maka biaya Aset tersebut adalah seBesar nilai wajar pada saat Aset tersebut diperoleh. Pengukuran Aset tetap harus memperhatikan kebijakan mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap. Jika nilai pembelian Aset tetap Lebih rendah Dari nilai satuan minimum kapitalisasi, asset tetap tidak dapat diakui dan dicatat sebagai Aset tetap. Pada asaset-Asetni dianggap sebagai persediaan/Aset lainnya. Nilai unit terkecil yang kapitalisasi merupakan Pengeluaran pembelian baru.

9.4.1 Komponen Pada Biaya

Biaya perolehan Aset tetap termasuk harga pembeliannya atau konstruksinya, termasuk beaimpor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa Aset tersebut pada kondisi yang membuat Aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan bagian Dari Komponen biaya Aset tetap sepanjang biaya tersebut serta tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan biaya perolehan Aset atau membawa Aset ke kondisi kerjanya. Sehingga, biaya awal (start- up cost) dan pra-produksi serupa bukan merupakan bagian biaya suatu aset, kecuali jika biayain diperlukan untuk membawa Aset ke kondisi kerjanya. Setiap diskon pembelian dan rabat akan dipotong Dari harga pembelian.

9.4.2 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Jika waktu penyelesaian pengerjaan suatu Aset tetap meLebih atau melewati satu periode tahun anggaran, maka Aset tetap yang belum selesai tersebut akan diklasifikasikan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai Aset tersebut selesai dan siap digunakan.

9.4.3 Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan Dari masing-masing Aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengaloKaskan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing Aset yang bersangkutan.

9.4.4 Pertukaran Aset

Suatu Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset tetap yang tidak serupa atau Aset lainnya. Biaya Dari pos semacam tu diukur berdasarkan nilai wajar Aset yang diperoleh Yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat Aset yang dilepas

setelah disesuaikan dengan jumlah setiap Kas atau setara Kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan. Suatu Aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu Aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan Aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak adan keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksini. Biaya Aset yang baru diperoleh dicatat seBesar nilai tercatat (carrying amount) atas Aset yang dilepas.

9.4.5 Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh Dari sumbangan (donasi) harus dicatat seBesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan Aset tetap Dari donas diakui sebagai Pendapatan operasional.

9.4.6 Pengeluaran Setelah Pembelian

Pengeluaran setelah pembelian awal suatu Aset tetap yang memperpanjang umur manfaat atau yang kemungkinan Besar memberikan manfaat ekonomi d masa depan dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan StanDari kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat Aset yang bersangkutan. Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu digunakan untuk menentukan apakah Pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.

9.4.7 Pengukuran Terhadap Pengukuran Awal

Aset tetap disajikan seBesar biaya perolehan Aset tetap tersebut dikurang akumulasi penyusutan. Jika kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka Aset tetap akan disajikan dan disesuaikan pada masing-masing akun Aset tetap dan akun ekuitas.

9.4.8 Penyusutan

Penyusutan merupakan suatu aloKas yang sistematis terhadap nilai suatu Aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan pada masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Metode penyusutan yang digunakan adalah Metode garis lurus (straight line method) atau Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) serta Metode unit produksi (unit of production method). Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh Aset tetap disusutkan sesua dengan sifat dan karakteristik Aset tersebut.

9.4.9 Aset Bersejarah

Aset bersejarah dapat disajikan dalam bentuk unit, seperti jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam melakukan catatan atas laporan keuangan dengan tanpa

nilai. Biaya pada perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya Pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan Aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan loKas yang adan pada periode berjalan.

9.4.10 Penghentian dan Pelepasan

Aset tetap dieliminasi Dari neraca ketika dilepaskan atau apabila Aset secara permanen dihentikan Dari penggunaannya dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi Dari Neraca dan mengungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan Dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi Aset tetap dan harus dipindahkan ke pos Aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya

9.5 Jurnal Standar

Dalam transaksi pembelian Aset tetap yang menggunakan mekanisme LS, Aset tetap diakui ketika telah terjadi serah terima barang Dari pihak ketiga dengan SKPD terkait. Berdasarkan Bukti transaksi berupa Berita Acara Penerimaan Barang atau Berita Acara Serah Terima, PPK-SKPD membuat Bukti memorial Aset tetap yang kemudian diotorisasi oleh Pengguna Anggaran. Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, PPK SKPD akan mengaku adanya penambahan Aset tetap dengan jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap	xxx	
		xxx	Utang Belanja Modal		xxx

Selanjutnya dilaksanakan proses penatausahaan untuk Pembayaran perolehan Aset tetap tersebut hingga SP2D LS terbit. Berdasarkan SP2DLS tersebut PPK-SKPD akan membuat jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Utang Belanja Modal	xxx	
		xxx	RK PPKD		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Belanja Modal	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

Apabila pembelian Aset tetap dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU, pengakuannya dilakukan berdasarkan Bukti Pembayaran (Bukti belanjanya). Berdasarkan Bukti tersebut, PPK-SKPD akan menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Aset Tetap	xxx	
		xxx	Kas Di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Belanja Modal	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka digunakan nilai wajar pada saat perolehan. Untuk Aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola, biaya perolehannya meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset tetap tersebut. Beban penyusutan di jurnal setiap akhir periode (bulanan, triwulanan, semesteran atau tahunan). Setiap penyusutan akan di jurnal sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Beban Penyusutan	xxx	
		xxx	Akumulasi Penyusutan		xxx

Beban penyusutan merupakan alokas penyusutan yang akan dilaporkan dalam Laporan Operasional entitas. Seperti layaknya beban lainnya, beban penyusutan merupakan akun nominal yang pada akhir periode harus ditutup sehingga saldonya nol di setiap awal periode. Sedangkan akumulasi penyusutan akan dilaporkan dalam neraca. Akumulasi penyusutan bukan merupakan akun nominal sehingga angkanya tidak akan pernah ditutup di akhir tahun. Akumulasi penyusutan merupakan total Dari penyusutan suatu Aset tetap yang telah dibebankan. Akumulasi penyusutan menjadi pengurang Aset tetap dalam neraca dimana harga perolehan Aset tetap yang telah dikurang dengan akumulasi penyusutannya menjadi nilai Buku (book value) Aset tetap tersebut.

Bab 10

Akuntansi Aset Tetap-Bagian 2 (Penghentian)

10.1 Pengeluaran Setelah Perolehan

Suatu Pengeluaran setelah perolehan atau Pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Meningkatkan manfaat ekonomi pada Aset tetap yang dipelihara Yaitu berbentuk:
 - 1) Menambahnya ekonomis/efisien
 - 2) Menambahnya umur ekonomis
 - 3) Menambahnya volume, dan
 - 4) Menambahnya kapasitas produksi.
- b. Nilai Pengeluaran Belanja atas pemeliharaan Aset tetap tersebut harus sama dengan atau meLebih nilai satuan minimum kapitalisasi Aset tetap.

Nilai unit kapitalisasi minimum adalah penambahan Aset tetap dari hasil pengembangan klasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai satuan kapitalisasi minimum harus ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dalam setiap entitas pelaporan biaya renovasi telah melampaui unit kapitalisasi minimum. Untuk transaksi, kapitalisasi jurnal PPK-SKPD sebagai berikut:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Aset Tetap	xxx	
		xxx	Kas Di Bendahara Pengeluaran		xxx

Jurnal LRA.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
Xxx	xxx	xxx	Belanja Modal	xxx	
		xxx	Perubahan SAL		xxx

10.2 Pelepasan Aset Tetap

Pelepasan Aset tetap dapat terjadi karena proses penghapusan Aset tetap yang dapat diikuti oleh proses transfer, seperti penjualan, dan pemusnahan Aset tetap. (Mararu and Pontoh 2018) Untuk menghilangkan Aset tetap dengan pemusnahan, KDP SKPD akan membuat Bukti peringatan dibuat berdasarkan Keputusan Kepala Regional mengenai Penghapusan Aset Tetap. Setelah Bukti peringatan diotorisasi oleh pengguna anggaran, SKPD PPK kemudian membuat jurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
		xxx	Aset Lainnya	xxx	
		xxx	Aset Tetap		xxx

Jurnal LO dan Neraca.

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	xxx	
		xxx	Aset Lainnya		xxx

10.3 Jurnal StanDari

Sementara dalam penghapusan Aset tetap diikuti oleh proses penjualan, SKPD harus menyerahkan Aset tetap ke PPKD, karena wewenang untuk menjual Aset tetap di PPKD. Dengan demikian, KDP SKPD masih mencatat penghapusan Aset tetap. Penghapusan jurnal Aset tetap untuk Aset yang akan diserahkan ke PPKD kemudian dijual, yaitu:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Akumulasi Penyusutan	xxx	
		xxx	Aset Lainnya	xxx	
		xxx	Aset Tetap		xxx

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	RK PPKD	xxx	
		xxx	Aset Lainnya		xxx

Setelah menerima pelimpahan Aset Dari SKPD, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas Di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Aset Lainnya		xxx
		xxx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		xxx

Pada saat Aset tersebut telah dijual oleh PPKD, berdasarkan Bukti transaksi penjualan, Fungsi Akuntansi PPKD menjurnal:

Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas Di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Aset Lainnya		xxx
		xxx	Surplus Penjualan Aset Non Lancar		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx

Atau Jurnal LO dan Neraca

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Kas Di Kas Daerah	xxx	
		xxx	Defisit Penjualan Aset Non Lancar	xxx	
		xxx	Aset Lainnya		xxx

Jurnal LRA

Tanggal	Nomor Bukti	Kode Rekening	Uraian	Debet	Kredit
xxx	xxx	xxx	Perubahan SAL	xxx	
		xxx	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan		xxx
			Dipisahkan		

Aset tetap merupakan bentuk Aset berwujud yang mempunyai masa manfaat Lebih Dari 12 (dua belas) bulan yang dapat digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Klasifikasi Aset Tetap terdiri Dari:

- a. Tanah
- b. Peralatan dan Mesin
- c. Gedung dan Bangunan
- d. Jalan, rigasi, dan Jaringan
- e. Aset Tetap Lainnya
- f. Konstruksi dalam Pengerjaan

Prinsip Pengakuan dan Pengukuran Aset tetap adalah sebagai berikut.

- 1) Aset diakui ketika potensi untuk manfaat ekonomi d masa depan diperoleh pemerintah dan memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 2) Sejalan dengan penerapan Basis akrual, Aset dalam bentuk piutang atau biaya d muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan Arus Kas atau manfaat ekonomi lain Dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim dapat diukur. atau diperkirakan.

- 3) Aset yang tidak dikenal jika Pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonomi dianggap mustahil untuk mendapatkan pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.
- 4) Aset masih dicatat dengan biaya.
- 5) Aset masih direkam pada nilai wajar jika biaya akuisisi tidak memungkinkan penggunaan.
- 6) Biaya biaya pembelian, yaitu:
 - a) Harga pembelian Aset tetap
 - b) Semua biaya yang terjadi sampai Aset tetap tersedia untuk digunakan, termasuk:
 - c) Biaya perjalanan dinas
 - d) Ongkos angkut
 - e) Biaya uji coba
 - f) Biaya konsultan, dll
- 7) Pengeluaran pada Belanja untuk Aset tetap setelah perolehan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
 - a) Belanja dalam pemeliharaan adalah Belanja untuk mempertahankan kondisi Aset tetap dalam keadaan awal.
 - b) Belanja dalam peningkatan adalah Belanja yang memberikan manfaat ekonomi di masa depan berupa peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan Standar kinerja. Belanjanya harus dikapitalisasi dan menambah nilai aset.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai-nilai yang terkait dengan penurunan kapasitas dan kegunaan suatu aset. Kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, semua Aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset-aset ini. Metode penyusutan yang dapat dipilih dan digunakan, seperti garis lurus, berbagai saldo, unit produksi.

Jika Pengeluaran Modal dilakukan secara tunai, maka catatan Aset masih dicatat dalam jurnal keuangan bersama-sama dengan perekaman Belanja Modal dalam Buku Akun Anggaran. Kemudian jika Aset tetap telah digunakan, maka pada akhir setiap tahun harus dilakukan oleh jurnal depresiasi dan melaksanakan Aset tetap dalam Buku jurnal keuangan. Presentasi Aset tetap di lembar wajah neraca dan diungkapkan di CALK.

Bab 11

Akuntansi Hutang dan Pinjaman Daerah

11.1 Definisi Utang

Hutang adalah kewajiban yang timbul Dari pada peristiwa masa lalu, dan penyelesaiannya akan menyebabkan hasil semasa sumber ekonomi pemerintah. Dalam hal ini, Hutang negeri termasuk pinjaman luar (PLN) dan surat berharga negara (SBN).

11.2 Klasifikasi Utang

Apa yang dimaksud dengan klasifikasi Hutang dalam modul ini adalah klasifikasi Standar akuntansi pemerintah dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 yang mengatur bahwa utang dibagi menjadi utang Jangka Pendek dan Hutang Jangka panjang. (Pemerintah 2005)

Utang Jangka Pendek adalah Hutang yang harus dilunasi atau jatuh tempo pada periode akuntansi. Dengan kata lain, jika Hutang diperkirakan akan dilunasi dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, Hutang dapat diklasifikasikan sebagai Hutang Jangka pendek. Utang Jangka Pendek dapat berasal Dari pinjaman luar negeri (PLN) dan Securities State (SBN). Utang Jangka Pendek terdiri Dari:

- a. Hutang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan;
- b. Bagian yang Lancar Dari utang Jangka panjang Dari bagian saat ini Dari utang Jangka panjang adalah bahwa semua bagian utang Jangka panjang jatuh tempo dan harus dibayar dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- c. Hutang Biaya kewajiban Hutang adalah kepentingan utang dan biaya utang lainnya yang telah terjadi dan akan dibayar setelah tanggal pelaporan. Biaya kewajiban berbayar meliputi: (i) Hutang bunga, (ii) biaya utang lainnya (biaya masih dibayarkan), seperti biaya peringkat, perekaman, dan komitmen.–

Utang Jangka Panjang adalah Hutang yang harus dilunasi atau jatuh tempo Lebih Dari satu periode akuntansi. Jika kondisi berikut dipenuhi, Hutang yang jatuh tempo dalam 12 bulan ke depan masih diklasifikasikan sebagai Hutang Jangka panjang:

- a. Masa jabatan asli melebihi 12 bulan;
- b. Entitas bermaksud untuk menyelesaikan kewajiban Jangka panjang.
- c. Niat ini didukung oleh Perjanjian Refinancing atau Penjadwalan Ulang, dimana: Lengkap sebelum laporan keuangan disetujui. Hutang Jangka panjang dapat berasal Dari pinjaman luar negeri (PLN) dan surat. Negarain berharga (SBN).

Hutang Jangka panjang boleh diperoleh Dari pinjaman luar (PLN) dan surat. Negarain berharga (SBN). Hutang Jangka panjang termasuk: (i) Hutang Jangka panjang SBN; (ii) Hutang luar negeri, meliputi: Hutang luar negeri Jangka panjang SBN; PLN Hutang Jangka panjang. (Direktorat Jenderal Perimbangan Pemerintah 2008)

11.3 Apa ada Hidup Sesudah Mati?

11.3.1 Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan untuk mengkompilasi laporan keuangan pemerintah adalah uang tunai yang masih harus dibayarkan. Sistem Realisasi Penerimaan dan Pembayaran digunakan untuk mengkonfirmasi pendapatan, pengeluaran, dan Pembelanjaan dalam laporan Realisasi anggaran, dan digunakan untuk mengkonfirmasi sistem Aset aktual, liabilitas dan Ekuitas di neraca. Sistem Realisasi Pendapatan dan Pembayaran laporan Realisasi Anggaran berarti Pendapatan dipastikan ketika uang tunai diterima dalam

rekening Kas umum atau entitas pelaporan nasional, dan Pengeluaran dikonfirmasi ketika dihapus Dari rekening Kas umum atau entitas pelaporan. Basis akrual Dari neraca berarti bahwa aset, liabilitas, dan Ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat transaksi atau peristiwa atau kondisi lingkungan mempengaruhi keuangan pemerintah, terlepas Dari kapan uang tunai atau setara Kas diterima atau dibayar.

11.3.2 Pengakuan Utang

Utang diakui ketika uang tunai dan / atau setara Kas diterima oleh pemerintah dan / atau ketika utang muncul. Hutang dapat muncul pada waktu: (a) transaksi dengan pertukaran (transaksi pertukaran); (B) transaksi tanpa pertukaran (transaksi non-pertukaran), sesuai dengan hukum dan kebijakan yang berlaku diterapkan belum dilunasi sampai tanggal pelaporan; (c) peristiwa yang berkaitan dengan pemerintah (pemerintah tentang peristiwa); (d) peristiwa yang diakui pemerintah (peristiwa yang diakui pemerintah);

11.3.3 Pengukuran Utang

Hutang dicatat dengan nilai nominal. Hutang dalam mata uang asing diterjemahkan dan dinyatakan dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar (tingkat sekunder BI) pada tanggal neraca. Nilai nominal untuk Hutang mencerminkan nilai utang pemerintah pada saat pertama kali transaksi terjadi karena nilai yang dinyatakan dalam lembar utang pemerintah. Aliran ekonomi kemudian, seperti transaksi pembayaran, Perubahan penilaian karena Perubahan nilai tukar mata uang asing, dan Perubahan lain Selain mengubah nilai pasar, dihitung dengan menyesuaikan nilai Hutang yang dicatat. Nilai tercatat (jumlah yang direkam) adalah nilai Dari Buku utang yang dihitung Dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskon atau premi yang tidak dapat ditakdirkan

11.3.4 Penyajian dan Pengungkapan Utang

Hutang disajikan dalam neraca NHAH yang tercatat (mencapai jangkauan). Hal-hal yang akan diungkapkan dalam penjelasan pos neraca, yaitu perincian masing-masing Jenis Hutang (jika banyak detail atau Lebih Dari satu halaman harus dilakukan terlampir), jatuh tempo, suku bunga, diskon premium / amortisasi, dan perbedaan antara nilai tukar Dari nilai tukar utang terjadi antara nilai tukar transaksi dan tanggal neraca.

11.3.5 Penghapusan Utang

Penghapusan utang adalah pembatalan sukarela Dari tagihan oleh kreditor pada debitur, baik atau semua debitur Dari total debitur dalam bentuk perjanjian formal antara keduanya. Lebih banyak informasi kulit tentang penghapusan Hutang harus disajikan dalam catatan laporan keuangan sebagai bagian Dari pengungkapan posting Hutang terkait.

11.4 Pengertian Pinjaman Daerah

Definisi Pinjaman Regional Menurut UU No.33 tahun 2004 tentang Neraca Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

Pinjaman regional adalah semua transaksi yang menyebabkan wilayah tersebut menerima sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang Dari sisi lain sehingga daerah tersebut dibebani dengan kewajiban untuk membayar (Verma et al. 2016)

11.5 Jenis Pinjaman Daerah

Jenis pinjaman daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- Pinjaman Jangka Pendek adalah pinjaman regional dalam Jangka waktu yang Kurang atau sama dengan tahun Anggaran dan kewajiban untuk membayar kembali pinjaman yang menutupi pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun fiskal.

- b. Pinjaman Jangka menengah, adalah pinjaman regional dalam periode Lebih Dari satu tahun Anggaran dan kewajiban Pembayaran pinjaman yang mencakup pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi dalam periode waktu yang tidak meLebih Jangka waktu yang terSisa regional Kepala yang bersangkutan.
- c. Pinjaman Jangka panjang, adalah pinjaman regional dalam Jangka waktu Lebih Dari satu tahun Anggaran dan kewajiban Pembayaran pinjaman yang mencakup pokok pinjaman, bunga dan biaya lain harus dilunasi pada tahun fiskal berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman yang relevan

11.6 11.6 Sumber Pinjaman Daerah

Sumber pinjaman daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pemerintah Daerahlain.
- b. Lembaga keuangan bank yang berbadan hukumIndonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara RepublikIndonesia.
- c. Lembaga keuangan bukan bank yang berbadan hukumIndonesia dan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara RepublikIndonesia.
- d. Pemerintah yang dananya berasal Dari Pendapatan APBN dan atau pengadaan pinjaman pemerintah Dari dalam negeri maupun luarnegeri.
- e. Masyarakat

11.7 Kegunaan & Pembayaran Kembali Pinjaman

11.7.1 Kegunaan Pinjaman Daerah

Kegunaan pinjaman daerah menurut Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

- a. Pinjaman Jangka Pendek hanya digunakan untuk menutupi Arus Pendek pada tahun fiskal.
- b. Pinjaman digunakan untuk membiayai penyediaan layanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan.
- c. Pinjaman Jangka panjang digunakan untuk membiayai proyekInvestasi yang menghasilkan penerimaan.

11.7.2 Persyaratan dalam Melakukan Pinjaman Daerah

Persyaratan pinjaman daerah menurut PeraturanPemerintah No.54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:

- a. Pinjaman JangkaPendek
 - 1) Kegiatan yang akan dibiayai Dari pinjaman Jangka Pendek telah dianggarkan dalam APBD tahunni.
 - 2) Kegiatan yang akan dibiayai Dari pinjaman Jangka Pendek adalah kegiatan mendesak dan tidak dapat tidak.
 - 3) Persyaratan lain yang diperlukan oleh calon pemberi pinjaman.
- b. Pinjaman Jangka Menengah atau JangkaPanjang
 - 1) Jumlah pinjaman regional yang terSisa ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak meLebih 75% Dari total Pendapatan umum APBD sebelumnya.
 - 2) Rasio proyeksi kemampuan keuangan regional untuk memulihkan pinjaman Setidaknya kecil.
 - 3) Tidak memiliki tunggakan untuk pengembalian pinjaman Dari pemerintah.
 - 4) Dapatkan Perjanjian DPRD.
- c. Pembayaran Kembali Pinjaman Daerah

Pembayaran kembali pinjaman daerah menurut Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah adalah:

- 1) Kewajiban untuk membayar pinjaman regional yang jatuh tempo harus dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan atau dibayar dalam tahun Anggaran yang relevan.
- 2) Pembayaran pinjaman regional Dari pemerintah, dilakukan dalam mata uang yang tepat yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah

Bab 12

Konsolidasi Laporan Keuangan

12.1 Pengertian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasi memiliki arti yaitu menggabungkan seluruh laporan keuangan PPKD dan laporan keuangan SKPD menjadi satu kesatuan laporan keuangan, dalam hal ini laporan pemerintah daerah berfungsi sebagai entitas pelapor. Dalam mengimplementasikan Tujuan dan peran pelaporan keuangan pemerintah Indonesia, sehingga membutuhkan laporan keuangan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian dalam pemerintah Indonesia atas entitas pelaporan yang mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi, termasuk laporan keuangan Badan Layanan Publik. Presentasi laporan keuangan konsolidasian terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan untuk Laporan Keuangan (CALK). Proses konsolidasi diikuti oleh penghapusan rekening timbal balik, jika ada sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan atau yang belum dilakukan oleh Bendahara pembayar hingga saat periode akuntansi. Namun, jika eliminasi dimaksudkan itu tidak mungkin, dimungkinkan di Calk. (Kurniasari 2013)

(Kurniasari 2013) Prosedur konsolidasi dilakukan dengan menggabungkan dan menambah akun yang dipegang oleh entitas pelaporan lain atau tanpa menekankan akun timbal balik. Entitas pelapor mengkompilasi laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan dari semua entitas akuntansi yang secara organisas di bawahnya. Ketika konsolidasi dilakukan tanpa menghilangkan akun dan perkiraan timbal balik akan dimasukkan dalam Calk. Laporan konsolidasi tentang BLU dikombinasikan dengan Kementerian Negara / Lembaga Teknis Pemerintah Pusat atau Daerah yang mengaturnya dengan kondisi berikut: LRU BLU sangat dikumpulkan ke LRA Kementerian Negara / Lembaga Teknis Pemerintah Pusat atau Daerah Pusat untuk mengambilnya. Keseimbangan BLU dikelompokkan dengan neraca Kementerian Negara / Lembaga Teknis Pemerintah Pusat atau daerah yang membawanya. (Direktorat Jenderal Perimbangan Pemerintah 2008) (Keuangan et al., 2008).

Industri yang mempunyai Lebih Dari satu industri lazimnya akan menunjukkan bentuk laporan keuangan konsolidasian. Prinsipnya adalah untuk menyajikan laporan keuangan yang berisi kombinasi laporan milik perusahaan induk dan entitas anak perusahaan dalam satu laporan sehingga seolah-olah mereka berada dalam satu entitas. Tujuan menyusun laporan adalah untuk menyediakan gambaran Tujuan secara menyeluruh dari posisi keuangan dan aktivitas sekelompok perusahaan (orang tua dan anak) sehingga mereka dapat dimengerti bagi pihak yang berkedudukan penting (investor, auditor, dll.)

Wujud dari laporan tersebut apabila diperlukan oleh industri pusat memiliki kendali atas perusahaan Selain pusat atau yang biasa disebut cabang industri. Ada beberapa syarat-syarat yang membutuhkan laporan ini yaitu sebagai berikut:

- a. Adanya satu atau lebih cabang industri yang dapat ditunjukkan dengan pemilik saham.
- b. Kepemilikan saham induk perusahaan dari anak perusahaan lebih dari 50%
- c. Kepemilikan saham induk korporasi anak perusahaan kurang dari 50% tetapi perusahaan induk memiliki kontrol penuh. Jika kondisi d atas tidak terpenuhi, perusahaan sudah cukup untuk membuat setiap laporan keuangan secara mandiri.

12.1.1 Definisi Budaya Timur

Budaya yang berkembang di negara-negara Asia termasuk Asia Tenggara khususnya Indonesia dikenal dengan budaya Timur. Mengutamakan kesopanan dan aturan tertentu merupakan wujud dari budaya Timur. Sikap ramah tamah dan santai juga identik dengan budaya Timur. Masyarakat tidak memiliki ambisi yang besar terutama untuk mendapatkan kekayaan. Hal inilah yang membuat masyarakat Timur lebih santai dan lebih memilih untuk menikmati hidupnya. (Hasbiyalla 2021)

Agama Hindu dan Budha yang lebih banyak memengaruhi kebudayaan Timur. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kebudayaan, kedua agama ini cukup mendominasi. Keberadaan kedua agama ini sulit dihilangkan keberadaannya karena sudah mendarah daging di masyarakat. Adanya akulturasi atau asimilasi budaya akan menambah keberagaman budaya bangsa.

12.2.2 Langkah-langkah dalam Membuat Laporan Keuangan Konsolidasi secara teratur atau tersusun :

- Memeriksa laporan keuangan Dari entitas induk dan anak perusahaan dengan menyeluruh. Mengidentifikasi apakah adan kesalahan atau kelalaian dalam perekaman maka revisi dan penyesuaian.
- Sesuaikan laporan dalam penghapusan laba-rugi antara setiap industri.
- Mengeliminasi Pendapatan dan dividen cabang perusahaan dengan mengembalikan saldo akun investas pada bagian cabang untuk menyeimbangkan ketika awal periode.
- Lakukan penyesuaian untuk membuat catatan Dari bagian Dari minat yang tidak mengendalikan dalam Laba dan dividen anak perusahaan.
- Dalam laporan entitas anak, penghapusan saldo Investasi resiprok dilaporkan dalam laporan keuangan Entitas Bumi. Meskipun, eliminasi Ekuitas dilaporkan pada anak perusahaan keuangan.
- Jika ada perbedaan nilai wajar, sehingga dapat melakukan alokasi dan amortisasi.
- Hilangkan terhadap saldo resiprok lainnya (piutang utang, Pendapatan dan beban, dll.).

12.1.3 Perbandingan Pelaporan Konsolidasi Akuntansi Sektor Publik

	Indonesia	Internasional	Inggris (Lokal)	Inggris (Pusat)	Amerika Serikat	
<i>Standars Setting Body</i>	<i>International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) yang diterbitkan oleh International Federation of Accountant (IFAC)</i>	IPSASB	CIPFA+ASB	ASB + HM Treasury (FRAB)	GASB +	FASAB
<i>Standars</i>	SAP	IPSAS 6-7-8	SORP 2006+FRS	UK GAAP-berdasar WGA	GASB 14-39-34	SFFAC 1-2-4
<i>Sector of Application</i>	Publik	Public	Swasta yg di adaptasi utk sektor publik		Publik	Publik
<i>Reporting Entity</i>	Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian/ Lembaga, Satuan Organisasi wajib sesuai UU	Semua	Lokal	Pusat	Negara, Lokal, & Pemerintah Tujuan Khusus	Pemerintah USA

	Kanada	Swedia		Selandia Baru	Australia	Perancis
<i>Standards Setting Body</i>	PSAB	SCMA	ESV	NZ ICA	AASB	OEC
<i>Standards</i>	PS 1300-2500-2510	RKR 8.1	ESV (Peraturan & Rekomendasi)	NZ IAS 27-28-31	AASB 127 AASB 1049 AAS 27-29-31	Manual (OES, 1992)
<i>Sector of Application</i>	Publik	Publik		Publik/Swasta	Publik/Swasta	Publik
<i>Reporting Entity</i>	Semua	Lokal	Pusat	Semua	Semua	Lokal

Tabel 12.1: Gambar Tabel Perbandingan Pelaporan Keuangan Konsolidasi Akuntansi Sektor Publikid Beberapa Negar. (Gross and Pepe 2009) diolah

Pustaka

- Admin Ham. 2014. "Teknik Akuntansi Sektor Publik." *Blogspot.Com*. Retrieved November 29, 2021 (<http://hamtox.blogspot.co.id>).
- Antoro, Setyawan Dw (Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan). 2017. "Pecatatan Persediaan Pemerintah: Perpetual Atau Periodik." *Bppk.Kemenkeu.Go.Id*. Retrieved October 5, 2021 (<https://bppk.kemenkeu.go.id>).
- Binus University. 2015. "Unsur-Unsur Dalam Laporan Keuangan Pemerintah." *Binus University*.
- Bupati Rembang. 2019. *Modul Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019 (Audited)*. Rembang.
- Deev. 2017. "Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Dindonesia." *STIE Bukit Zaitun*.
- Dewi Sarifah Tullah, Erma Apriyanti, and Emi Suryat. 2019. "Faktor Penentu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Jurnal Akuntansi* 8(2).
- Direktorat Jenderal Perimbangan Pemerintah. 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Republikndonesia Nomor 86/PMK.05/2008 Tentang Sistem Akuntansi Utang Pemerintah*.
- Gie. 2020. "Pengertian Laporan Keuangan, Contoh, Dan Fungsiinya Untuk Bisnis Anda." *Accurate.Id*. Retrieved November 29, 2021 (<https://accurate.id/akuntansii/pengertian-laporan-keuangan-contoh-dan-fungsiinya>).
- Gross, Giuseppe, and Francesca Pepe. 2009. "Consolidation Financial Reportingn the Public Sector: A Cross-Country Comparison." *Journal Compilation Cipfa – Public Money Siena Universitytaly* 29(4):261–64.
- Hasbiyalla, I. 2021. "Kontekstualisasi Tauhid Spekulatif Dalam Perspektif Filsafat Sains." *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1(1).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, and (KSAP). 2007. *Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Buletin Teknis 05 Tentang Akuntansi Penyusutan Buletin Teknis 06 Tentang Akuntansi Piutang Buletin Teknis 07 Tentang Akuntansi Dana Bergulir)*.
- Kurniasari, Wiwin. 2013. "Laporan Keuangan Konsolidas Sektor Publik (Perbandingan Beberapa Negara)." *Journal Akuntansi* 1(1).
- Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit UI Press.
- Mararu, Gand, and Winston Pontoh. 2018. "PTEKS Perlakuan Akuntansi Terhadap Penghentian Dan Pelepasan Aset Tetap Pada Kantor Lurah Kleak." *Jurnalpteks Akuntansi Bagi Masyarakat* 2(2):48–51.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sketor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Menteri Keuangan Nomor 255/PMK. 2019. *Permenkeu 255/PMK.05/2019 Tentang Akuntansi Pemerintah Pusat*.
- Pandowo, Hed, and Ahmad Khudori. 2017. "Analisis Laporan Arus Kas Pemerintah Daerah (Studi Empiris Di Pemerintah Kota Madiun)." *Jurnal Administras Dan Bisniss* 11(1).
- Pemerintah, Peraturan. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 LampiranX Tentang Stan Dari Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No.07*.
- Peraturan Pemerintah. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang StanDari Akuntansi Pemerintah*.
- Verma, A., R. P. Pradhan, S. K. Bele, and K. Gaurav. 2016. "Critical Success Factors for PPP Projectsnnfrastructure Development: Thendian Scenario." *Indian Journal of Regional Science* 48(2):12–27.

Biodata Penulis:



Sarwenda Biduri, SE, MSA, adalah dosen tetap Program Stud Akuntansi Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Lulus Dari S2 Magister Akuntansi STIESIA pada tahun 2011. Pengalaman di bidang pendidikan dimula saat menjadi dosen LB di Fakultas Ekonom dan Bisnis pada tahun 2010-2011 dan karir sebagai dosen dimula saat menjadi dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo pada tahun 2011 – sekarang. Aktif melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, baik berupa buku ajar, jurnal ilmiah, dan artikel populer. Fokus pada bidang akuntansi perilaku dan akuntansi sektor publik. Buku yang telah diterbitkan adalah Akuntansi Persekutuan & Kombinas Bisnis (2020), Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur (2019), Buku Akuntansi Keuangan

Lanjutan 1 (2019), Buku Akuntansi Sektor Publik (2018), Buku Akuntansi Pengantar (2017), dan Modul Kasus Akuntansi Manufaktur (2015)..



Ruc Arizanda Rahayu, SE, MSA, Ak, CA, menyelesaikan studi Profesi Akuntan pada Pendidikan Profesi Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2013 dan menyelesaikan studi Strata 2 (S2) pada Program Pascasarjana Magister Sains Akuntansi Universitas Brawijaya Malang tahun 2017. Pengalaman di bidang pendidikan dimulai pada saat menjadi Dosen LB pada Fakultas Ekonom dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2018-2019 dan karir sebagai dosen dimulai saat menjadi Dosen Tetap di Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo tahun 2019 – sekarang. Buku yang telah diterbitkan adalah Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur (2019).



Dr. Sigit Hermawan, SE, M.Si, Penulis adalah Dosen PNS LLDIKT Wilayah VI Jawa Timur Diperbantukan (DPK) pada Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial (FBHIS) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA). Penulis menyelesaikan studi Strata 3 (S3) Ilmu Ekonom Minat Akuntansi Fakultas Ekonom dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya tahun 2012. Pendidikan S2 Magister Akuntansi diselesaikan di Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004. Berpengalaman di bidang penelitian, penulisan karya ilmiah, dan buku ajar. Berbagia skim penelitian hibah Kemenristek DIKT pernah diraih mula tahun 2007-2019. Saatn juga dipercaya sebagai reviewer penelitian DIKTI. Pernah meraih tujuh penghargaan sebagai the best paper di berbagai even seminar

internasional dan nasional. Saat ini juga dipercaya sebagai reviewer di berbagai jurnal nasional terakreditasi, seminar nasional dan seminar internasional. Fokus pada bidang akuntansi perilaku, etika bisnis profesi, dan intellectual capital. Buku yang telah diterbitkan adalah Akuntansi Perusahaan Jasa, Dagang dan Manufaktur (2019), Etika Bisnis dan Profesi (2018), Akuntansi Pengantar 2 (2017), Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (2016), Akuntansi Pengantar 1 (2016), Pusparagam Manajemen Indonesia (2011), Modul Manual dan Komputerisasi, Penyusunan Laporan Anggaran Berbasis Kinerja dan Laporan Keuangan Sekolah (2009), Aplikasi Mudah dan Praktis MYOB Accounting Untuk Perusahaan Dagang (2008), Akuntansi Perusahaan Manufaktur (2008), dan Akuntansi Perusahaan Jasa (2006)

ISBN 978-623-6292-35-8 (PDF)

